HARIAN ACEH INDONESIA

TEBAL
20 Hal
WWW.HARIANACEH.CO.ID

MINGGU, 22 NOVEMBER 2026 | HARIANACEH.co.id | WWW.HARIANACEH.CO.ID · EDISI NO. 16

NASIONAL

Buni Yani: Jokowi-Gibran Cepat atau Lambat akan Masuk Penjara, Kasus Hukum Sudah Sangat Banyak

Oleh Redaksi · 22 Nov, 20.03 WIB



BANDA ACEH - Pegiat media sosial dan akademisj Indonesia, Buni Yani, melontarkan pernyataan keras terkait masa depan Politik Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia menilai, cepat atau lambat, keduanya berpotensi menghadapi persoalan hukum menyusul berbagai kasus yang menurutnya perlu mendapat perhatian serius.

Buni Yani bahkan meminta Presiden Prabowo Subianto mengambil inisiatif politik untuk melarang Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan membubarkan organisasi-organisasi relawan yang selama ini dikaitkan dengan kekuatan politik Jokowi.

Menurut Buni Yani, persoalan hukum yang dikaitkan dengan Jokowi dan Gibran tidak boleh dipandang sebelah mata. Ia menilai berbagai persoalan tersebut harus ditelusuri melalui mekanisme hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan berkepanjangan dalam kehidupan bernegara.

"Jokowi-Gibran cepat atau lambat akan masuk penjara. Kasus hukum sudah sangat banyak yang memberatkan mereka," ujar Buni Yani, Ahad (22/11/2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Buni Yani menghendaki adanya pertanggungjawaban hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam berbagai persoalan selama pemerintahan sebelumnya. Namun, dugaan maupun tuduhan hukum tetap harus dibuktikan melalui proses peradilan yang independen.

Selengkapnya di halaman 2 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Gibran Bisa Balikkan Situasi Politik Jika Dimakzulkan, Ini Kata Mahfud MD



BANDA ACEH - Mahfud MD mengungkapkan alasan lebih mendukung Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden dibandingkan melalui mekanisme pemakzulan atau impeachment.

Selengkapnya di halaman 3 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Aliran Uang Rp500 Juta ke Total Politik Terungkap di Sidang Korupsi Kuota Haji



BANDA ACEH — Terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) periode 2023–2024, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, mengungkapkan adanya penyerahan uang sebesar Rp500 juta kepada staf media Total Politik.

Selengkapnya di halaman 3 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

DALAM EDISI INI

NASIONAL 2
ACEH 12
Aneka Berita 15

ASIA

Pakai Fasilitas Militer, 7 Perwira AU Malaysia Ditangkap Selundupkan Narkoba ke RI



BANDA ACEH - Kepolisian dan militer Malaysia membongkar jaringan penyelundupan narkoba lintas negara yang melibatkan aparat aktif. Sebanyak tujuh perwira Angkatan Udara Kerajaan Malaysia (RMAF) resmi ditangkap usai kedapatan memanfaatkan fasilitas penerbangan militer untuk menyelundupkan barang haram ke luar negeri, dengan tujuan utama Indonesia dan Filipina.Kasus memalukan ini …

Selengkapnya di halaman 15 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Usut Laporan yang Menyeret Keluarga Jokowi, Mahfud MD Desak Prabowo Beri Sinyal ke KPK



BANDA ACEH - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mendesak Presiden Prabowo Subianto memberikan sinyal keberanian kepada aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Ia meminta KPK menindaklanjuti berbagai laporan dugaan korupsi yang menyeret sejumlah anggota keluarga mantan Presiden Joko Widodo secara transparan.

Selengkapnya di halaman 2 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

24 BERITA

NASIONAL

Buni Yani: Jokowi-Gibran Cepat atau Lambat akan Masuk Penjara, Kasus Hukum Sudah Sangat Banyak

Oleh Redaksi · 22 Nov, 20.03 WIB



BANDA ACEH - Pegiat media sosial dan akademisj Indonesia, Buni Yani, melontarkan pernyataan keras terkait masa depan Politik Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia menilai, cepat atau lambat, keduanya berpotensi menghadapi persoalan hukum menyusul berbagai kasus yang menurutnya perlu mendapat perhatian serius.

Buni Yani bahkan meminta Presiden Prabowo Subianto mengambil inisiatif politik untuk melarang Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan membubarkan organisasi-organisasi relawan yang selama ini dikaitkan dengan kekuatan politik Jokowi.

Menurut Buni Yani, persoalan hukum yang dikaitkan dengan Jokowi dan Gibran tidak boleh dipandang sebelah mata. Ia menilai berbagai persoalan tersebut harus ditelusuri melalui mekanisme hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan berkepanjangan dalam kehidupan bernegara.

“Jokowi-Gibran cepat atau lambat akan masuk penjara. Kasus hukum sudah sangat banyak yang memberatkan mereka,” ujar Buni Yani, Ahad (22/11/2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Buni Yani menghendaki adanya pertanggungjawaban hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam berbagai persoalan selama pemerintahan sebelumnya. Namun, dugaan maupun tuduhan hukum tetap harus dibuktikan melalui proses peradilan yang independen.

Tidak berhenti di situ, Buni Yani secara terbuka menyarankan agar Presiden Prabowo mengambil langkah terhadap PSI. Ia juga meminta agar organisasi-organisasi relawan yang selama ini menjadi bagian dari jaringan politik Jokowi dibubarkan.

“Sebaiknya Presiden @prabowo mengambil inisiatif melarang PSI dan membubarkan semua organisasi relawan yang telah menjadi instrumen kejahatan Jokowi selama ini,” tegasnya.

Seruan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa Buni Yani memandang keberadaan jaringan politik dan relawan Jokowi sebagai persoalan yang perlu dievaluasi. Ia mengaitkannya dengan dugaan penyalahgunaan kekuasaan pada periode pemerintahan sebelumnya.

NASIONAL

Anak Listyo Terseret Kasus Tambang PT Position, Penyelidikan Polda Malut Jalan di Tempat?

Oleh Redaksi · 21 Nov, 19.59 WIB

BANDA ACEH – Penanganan dugaan aktivitas pertambangan ilegal PT Position di Halmahera Timur, Maluku Utara, kembali menjadi sorotan.

Lebih dari setahun sejak persoalan ini mencuat, perkembangan penyelidikan Polda Maluku Utara masih dipertanyakan.

Hilangnya garis polisi di lokasi yang dipersoalkan hingga belum jelasnya tindak lanjut laporan pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menambah panjang daftar persoalan yang disuarakan kelompok masyarakat sipil.

Kasus ini bukan sekadar menyangkut dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin. Persoalan juga menyentuh dugaan pembukaan lahan di wilayah konsesi perusahaan lain serta penanganan laporan hukum yang dinilai belum memberikan kepastian.

Koordinator Konsorsium Advokasi Tambang (KATAM) Maluku Utara, Muhlis Ibrahim, kembali mendesak Polda Maluku Utara membuka perkembangan penanganan perkara tersebut.

Menurutnya, sejumlah peristiwa di lokasi tambang justru menimbulkan pertanyaan mengenai keseriusan pengawasan dan penegakan hukum.

KATAM menyoroti pemasangan garis polisi oleh Ditreskrimsus Polda Maluku Utara pada 27 Februari 2025.

Namun, ketika dilakukan pemantauan pada 28 April 2025, garis polisi tersebut disebut sudah tidak ditemukan. Portal pembatas yang sebelumnya dipasang PT Wana Kencana Mineral pada 19 Maret 2025 juga dilaporkan mengalami kerusakan.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan lokasi yang sebelumnya telah menjadi objek penanganan aparat penegak hukum.

KATAM juga mempertanyakan tindak lanjut Laporan Hasil Pengawasan Gakkum KLHK tertanggal 28 April 2025. Laporan tersebut menjadi salah satu dokumen yang disoroti dalam dugaan pembukaan lahan yang dikaitkan dengan PT Position di wilayah konsesi perusahaan lain.

Sebelumnya, pada 2 Februari 2026, KATAM melaporkan dugaan tindak pidana pertambangan tanpa izin terhadap PT Position ke Polda Maluku Utara.

Sepekan kemudian, tepatnya 9 Februari 2026, Ps Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Maluku Utara, Kompol Rona, menyampaikan bahwa perkara tersebut masih dalam proses penyelidikan dan penyidik tengah menyiapkan jadwal klarifikasi terhadap pelapor.

Namun, hingga November 2026, belum ditemukan pengumuman resmi mengenai penetapan tersangka dalam perkara dugaan pertambangan ilegal tersebut.

Kondisi ini membuat KATAM kembali mempertanyakan sejauh mana penyelidikan berjalan dan langkah hukum apa yang telah dilakukan penyidik.

Persoalan PT Position juga sebelumnya menyeret dua warga ke proses hukum setelah adanya laporan balik dari perusahaan.

Perkembangan perkara tersebut menjadi perhatian karena muncul tudingan adanya ketimpangan penanganan hukum antara …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Usut Laporan yang Menyeret Keluarga Jokowi, Mahfud MD Desak Prabowo Beri Sinyal ke KPK

Oleh Redaksi · 22 Nov, 20.16 WIB



BANDA ACEH - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mendesak Presiden Prabowo Subianto memberikan sinyal keberanian kepada aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Ia meminta KPK menindaklanjuti berbagai laporan dugaan korupsi yang menyeret sejumlah anggota keluarga mantan Presiden Joko Widodo secara transparan.

Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud saat berbincang dengan pakar hukum tata negara Refly Harun dalam tayangan di kanal YouTube Refly Harun, Sabtu (21/11/2026).

Menurut Mahfud, perubahan situasi politik dan hukum saat ini seharusnya menjadi momentum untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Ia menilai selama ini muncul kesan di tengah masyarakat bahwa KPK masih ragu atau takut menangani laporan tertentu.

"Keberanian yang harus dinyatakan oleh pemerintah dalam hal ini Presiden untuk mengatakan kepada KPK, 'kamu sekarang enggak usah takut pada siapa pun'. Kan kesan publik sekarang KPK itu takut," ujar Mahfud.

Mahfud secara khusus menyoroti sejumlah laporan masyarakat yang telah disampaikan kepada KPK, tetapi belum menunjukkan perkembangan signifikan. Ia menyinggung laporan yang pernah diajukan aktivis sekaligus dosen Ubedilah Badrun serta persoalan "Blok Medan" yang sempat muncul dalam persidangan.

Menurut Mahfud, laporan-laporan tersebut berkaitan dengan sejumlah nama dalam keluarga Joko Widodo, termasuk Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep, Bobby Nasution, hingga Jokowi sendiri.

"Mumpung sekarang sedang terjadi perubahan, kalau mau sungguh-sungguh menegakkan hukum, Pak Prabowo bisa menyatakan ke KPK. Itu laporan-laporan Badrun sudah berkali-kali enggak pernah dijawab tidak, tapi tidak pernah di-follow up. Menyangkut Bobby yang Blok Medan yang disebut di pengadilan, kemudian menyangkut Kaesang, menyangkut Gibran, dan menyangkut Pak Jokowi," kata Mahfud.

Ia menilai KPK perlu memberikan penjelasan kepada publik mengenai perkembangan laporan-laporan tersebut. Menurutnya, apabila proses hukum tidak menemukan bukti yang cukup, hasilnya juga harus disampaikan secara terbuka agar masyarakat memperoleh kejelasan.

"Coba itu dijelaskan kepada publik agar kita bisa belajar untuk masa depan, jangan melakukan hal-hal yang seperti itu lagi. Seumpama bersih, untuk masa depan boleh orang melakukan seperti itu karena tidak apa-apa, tidak ditemukan bukti di pengadilan misalnya. Nah, itu cara berkeadaban menurut saya, berkeadaban di dalam berhukum dan berdemokrasi," tambahnya.

Selain KPK, Mahfud turut menyoroti peran Kejaksaan Agung dan Kepolisian dalam menyelesaikan berbagai perkara yang dinilai belum memiliki kejelasan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Penampakan Posko Kombes Iman Imanuddin, Polri Temukan Spanduk terkait Makar

Oleh Redaksi · 21 Nov, 19.56 WIB

BANDA ACEH - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri menggeledah rumah di Bogor, Jawa Barat, yang diduga digunakan sebagai posko terkait kasus dugaan makar dalam perkara penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menemukan keterkaitan dengan dugaan tindak pidana makar.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan, penyidik menemukan indikasi permulaan permufakatan untuk melakukan makar.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Gibran Bisa Balikkan Situasi Politik Jika Dimakzulkan, Ini Kata Mahfud MD

Oleh Redaksi · 22 Nov, 20.11 WIB



BANDA ACEH - Mahfud MD mengungkapkan alasan lebih mendukung Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden dibandingkan melalui mekanisme pemakzulan atau impeachment. Menurut Mahfud, proses pemakzulan yang membutuhkan waktu panjang berisiko membuka peluang terjadinya manuver Politik yang dapat membalikkan situasi.Pandangan tersebut disampaikan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu dalam diskusi bersama pakar hukum tata negara Refly Harun di kanal YouTube Refly Harun, Sabtu (21/11/2026).

Dalam perbincangan tersebut, Mahfud menjelaskan bahwa pemakzulan harus melalui sejumlah tahapan persidangan di berbagai lembaga negara. Berdasarkan perhitungannya, seluruh proses tersebut dapat memakan waktu hingga sekitar tujuh bulan.

"Saya sendiri berpendapat mundur, Mas Refly, karena itu kalau ditunggu, ditunda melalui pemakzulan yang prosesnya harus sekian hari, sidang ini, sidang itu, nanti bisa terjadi penipuan lagi," ujar Mahfud.

Ia menilai rentang waktu yang tersedia selama proses pemakzulan dapat dimanfaatkan untuk melakukan berbagai manuver politik. Bahkan, jika proses tersebut dipercepat menjadi satu minggu, menurut Mahfud, peluang terjadinya perubahan situasi tetap terbuka.

"Orang seperti ini kalau dibiarkan terus, kalau waktu yang tersedia untuk pemakzulan taruhlah seminggu misalnya kalau dipercepat, di waktu-waktu itu bisa saja terjadi pembalikan situasi sehingga tidak jadi mundur. Oleh sebab itu, ya saya termasuk yang mengusulkan Gibran mundur, jangan melalui proses pemakzulan," tegasnya.

Mahfud juga mengkhawatirkan proses pemakzulan yang berlangsung berbulan-bulan di MPR dan lembaga terkait lainnya justru memunculkan berbagai interupsi politik. Akibatnya, persoalan pemberhentian wakil presiden berpotensi terus menggantung tanpa kepastian.

Menurut dia, kondisi tersebut dapat merugikan negara, baik dari sisi politik maupun ekonomi. Karena itu, pengunduran diri dinilai menjadi pilihan yang lebih cepat untuk mengakhiri ketidakpastian.

Dalam diskusi yang sama, Refly Harun turut menyampaikan pandangannya mengenai hak pengunduran diri pejabat publik. Ia membedakan pengunduran diri dengan pencalonan jabatan publik yang memiliki sejumlah persyaratan administratif.

Menurut Refly, pengunduran diri merupakan hak subjektif pejabat publik dan tidak memerlukan persyaratan khusus sebagaimana proses pencalonan.

Meski lebih mendukung pengunduran diri, Mahfud menegaskan bahwa langkah tersebut tidak serta-merta menutup kemungkinan proses hukum lainnya. Apabila ditemukan bukti pelanggaran pidana yang cukup dan diproses di pengadilan, pencabutan fasilitas negara maupun hak politik tetap dapat diajukan sebagai bagian dari tuntutan hukum.

NASIONAL

Aliran Uang Rp500 Juta ke Total Politik Terungkap di Sidang Korupsi Kuota Haji

Oleh Redaksi · 22 Nov, 20.21 WIB



BANDA ACEH — Terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) periode 2023–2024, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, mengungkapkan adanya penyerahan uang sebesar Rp500 juta kepada staf media Total Politik. Dana tersebut disebut berkaitan dengan kebutuhan kampanye haji dan kegiatan menjelang pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji 2024.Pengakuan itu disampaikan Gus Alex kepada wartawan saat jeda persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026).

Menurut Gus Alex, aliran dana bermula ketika dirinya menerima proposal kebutuhan Total Politik dari Wibowo Prasetyo dan Muhammad Nuruzzaman. Keduanya diketahui merupakan staf khusus mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

”Ya, jadi menjelang pansus itu saya dikirimin proposal oleh Mas Wibowo Prasetyo dan Muhammad Nuruzzaman tentang kebutuhan Total Politik,” kata Gus Alex.

Setelah menerima proposal tersebut, ia mengupayakan dana Rp500 juta dan menyerahkannya kepada Khumaidi, staf Wibowo Prasetyo.

”Atas hal tersebut kemudian saya mengupayakan saya serahkan dana sejumlah Rp500 juta kepada namanya Khumaidi. Khumaidi itu stafnya Mas Bowo,” ujarnya.

Meski mengakui menyerahkan uang tersebut, Gus Alex mengaku tidak mengetahui secara rinci teknis kebutuhan Total Politik yang tercantum dalam proposal. Ia hanya memahami dana itu dikaitkan dengan kampanye haji dan agenda menjelang pembentukan Pansus Haji.

”Nah, untuk lebih tahu lebih detail terkait Total Politik keperluan itu apa, itu saya tidak tahu itu. Sebenarnya itu apa itu saya tidak paham. Tapi yang jelas waktu itu terkait dengan kampanye haji dan menjelang pansus intinya,” tuturnya.

Asal-Usul Dana dan Pengembalian

Dalam persidangan, penasihat hukum mendalami asal-usul uang Rp500 juta yang diserahkan kepada Khumaidi tersebut, termasuk menanyakan apakah dana itu berasal dari seseorang bernama Syauqi.

Gus Alex membenarkan uang tersebut berasal dari Syauqi. Namun, ia mengklaim dana itu pada akhirnya telah dikembalikan kepada yang bersangkutan.

”Akadnya itu memberikan. Tapi kemudian saya mengembalikan pada akhirnya uang tersebut kepada Syauqi. Uang itu Rp500 juta dari Syauqi itu saya serahkan ke Khumaidi, stafnya Wibowo Prasetyo atas permintaan proposal Total Politik,” kata Gus Alex.

Rangkaian keterangan ini memunculkan sejumlah poin yang perlu diuji lebih lanjut di persidangan, mulai dari asal dana dari Syauqi, penyerahan melalui Khumaidi, hingga tujuan penggunaannya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Yaqut Akui Beri Tugas Khusus ke Gus Alex soal Haji, tetapi Bantah Ada Kewenangan Tambahan

Oleh Van · 21 Nov, 15.09 WIB

JAKARTA – Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengakui memberikan tugas tambahan kepada mantan staf khususnya, Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, untuk membantu mengoordinasikan penyelenggaraan ibadah haji, terutama haji reguler.

Dalam keterangannya kepada awak media Sabtu, (21/11/2026) Yaqut menegaskan tugas tersebut sebatas koordinasi dan pelaporan, bukan pemberian kewenangan khusus dalam pengelolaan haji.

"Saya berikan tugas tambahan untuk membantu saya dalam mengoordinasikan penyelenggaraan ibadah haji, utamanya adalah ibadah haji reguler," ujar Yaqut.

Ia menjelaskan, awalnya Gus Alex ditunjuk sebagai staf khusus Menteri Agama dengan tugas menangani bidang ukhuwah Islamiyah dan hubungan antarorganisasi kemasyarakatan (ormas).

Namun, dalam perjalanan tugasnya, Yaqut kemudian memberikan tanggung jawab tambahan agar Gus Alex membantu mengoordinasikan penyelenggaraan ibadah haji.

Menurut Yaqut, penunjukan tersebut didasarkan pada pengalaman dan latar belakang pendidikan Gus Alex.

Ia menyebut mantan staf khususnya itu pernah menjadi petugas haji serta merupakan lulusan Fakultas Syariah IAIN Yogyakarta dengan jurusan Hukum Islam.

"Maka saya anggap dia mengerti ini soal bukan hanya soal haji, tapi juga fikih perhajian," kata Yaqut dalam persidangan.

Meski terlibat dalam koordinasi penyelenggaraan haji, Yaqut membantah memberikan kewenangan khusus kepada Gus Alex.

Ia menyebut tugas mantan staf khususnya hanya membantu mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan program dan melaporkannya kepada Menteri Agama.

"Tidak ada kewenangan yang diberikan selain untuk membantu saya mengoordinasikan dan melaporkan kepada saya jika ada bottleneck atau hambatan-hambatan di dalam Direktorat Jenderal PHU dalam pelaksanaan haji, utamanya haji reguler," kata Yaqut.

Selain urusan penyelenggaraan ibadah haji, Yaqut juga mengungkapkan bahwa Gus Alex mendapat tugas membantu koordinasi sejumlah kantor wilayah Kementerian Agama.

Menurut Yaqut, koordinasi tersebut diperlukan karena beberapa kantor wilayah dinilai berjalan sendiri-sendiri dalam membuat inovasi maupun menentukan program.

Kondisi itu disebut membuat sejumlah kebijakan di daerah terkadang tidak selaras dengan program kementerian dan pemerintah pusat.

Dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023–2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa empat orang.

Mereka adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Ketua Umum Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudhah Eksati Utama, Asrul Aziz Taba.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Yusril Nyatakan Siap Jadi Wapres Pengganti Gibran, Sebut Berpengalaman di Pemerintahan

Oleh Redaksi · 21 Nov, 19.51 WIB

BANDA ACEH - Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan secara pribadi siap masuk dalam bursa calon Wakil Presiden (Cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka apabila diberi kepercayaan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Yusril menilai pengalamannya selama bertahun-tahun di bidang pemerintahan menjadi bekal untuk menjalankan tanggung jawab tersebut.

"Siap! Ya terserah kepada Pak Presiden kalau beliau memberikan kepercayaan. Kalau dari segi menjalankan tugas-tugas saya kira sudah cukup lama juga kita ada di pemerintahan ini dan belajarnya juga ilmunya juga enggak jauh-jauh daripada ilmu mengurusi negara juga," ujar Yusril saat menghadiri acara dialog Yusril for Vice President di Gedung Apung UI, Depok, Sabtu (21/11/2026).

Menurutnya, latar belakang keilmuan yang ditekuni di bidang hukum tata negara, ilmu Politik dan filsafat memiliki keterkaitan erat dengan urusan penyelenggaraan serta urusan kenegaraan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Beathor Suryadi: Gerakan Makar Jenderal LSP Terasa Hambar Jika Tidak Melibatkan Jokowi

Oleh Redaksi · 22 Nov, 22.19 WIB



BANDA ACEH - Aktivis senior sekaligus mantan Ketua ProDem ke-4, Beathor Suryadi, mempertanyakan dugaan keterkaitan Joko Widodo (Jokowi) dalam gerakan makar yang menyeret nama Jenderal LSP. Menurutnya, pengungkapan kasus tersebut akan terasa tidak utuh apabila penyidik tidak menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan pihak-pihak lain, termasuk Jokowi.Beathor menilai, Jenderal LSP bukanlah sosok yang dikenal sebagai pemain Politik yang memiliki ambisi untuk merebut kekuasaan. Karena itu, ia mempertanyakan apa sebenarnya tujuan di balik dugaan rencana gerakan makar tersebut.

“Jenderal LSP bukan orang politik dan tidak memiliki ambisi untuk berkuasa. Lantas, untuk apa LSP merencanakan gerakan itu?” kata Beathor dalam keterangannya, Ahad (22/11/2026).

Ia juga menyoroti pernyataan Jenderal Suyudi, menurut Beathor, disampaikan belum genap 20 hari setelah penangkapan, bahwa gerakan makar tersebut tidak melibatkan Jokowi.

Pernyataan itu justru memunculkan pertanyaan bagi Beathor. Ia mempertanyakan dasar penyidik menyimpulkan tidak adanya keterlibatan Jokowi, sementara proses pengungkapan perkara masih perlu mendalami berbagai kemungkinan dan hubungan antarpihak.

Beathor kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan posisi Jenderal LSP sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP). Menurutnya, salah satu fungsi penting jabatan tersebut adalah melihat, mendengar, dan mencatat berbagai perkembangan yang terjadi di lingkungan pemerintahan untuk mendukung tugas Presiden.

Atas dasar itu, Beathor mempertanyakan apakah penyidik telah menelusuri seluruh kemungkinan komunikasi, koordinasi, dan hubungan yang berkaitan dengan dugaan gerakan tersebut.

Di sisi lain, ia turut menyinggung pernyataan Jenderal Suyudi yang menyebut tidak terdapat persaingan pribadi antara dirinya dan Jenderal LSP.

Bagi Beathor, persoalan ini seharusnya tidak berhenti pada penjelasan mengenai hubungan personal antarpihak. Penyidik perlu mengungkap secara menyeluruh latar belakang, tujuan, serta pihak-pihak yang mungkin mengetahui atau memiliki hubungan dengan rencana tersebut.

“Sudah ada baiknya tim Bareskrim yang bertugas mengungkap kasus makar ini menemukan dan menelusuri keterkaitan Jokowi dalam gerakan tersebut,” tegasnya.

Beathor menekankan pentingnya pengusutan perkara secara terbuka dan berdasarkan bukti. Menurutnya, setiap kemungkinan harus diperiksa secara profesional agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai perkara yang tengah menjadi perhatian publik.

NASIONAL

Empat Posko Diduga Jadi Markas Makar, Bareskrim Temukan Jejak Persiapan Serangan

Oleh Redaksi · 21 Nov, 21.51 WIB

BANDA ACEH - Penyidikan dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto mulai mengungkap sejumlah lokasi yang diduga menjadi pusat aktivitas kelompok yang tengah diusut Bareskrim Polri. Tak tanggung-tanggung, penyidik menemukan empat lokasi yang terindikasi digunakan sebagai posko.Empat posko tersebut ditemukan setelah penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di sejumlah titik di Jakarta, Bogor, dan Tangerang.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan, penggeledahan dilakukan untuk menelusuri berbagai aktivitas yang diduga berkaitan dengan perkara makar. Salah satu temuan penting berada di sebuah rumah di Bogor yang diduga menjadi tempat berlangsungnya aktivitas persiapan.

"Kami telah melaksanakan penggeledahan selain di daerah Jakarta, Bogor, juga Tangerang yang kami menemukan berbagai aktivitas," kata Susatyo, Sabtu (21/11/2026).

Dari hasil sementara, penyidik mengidentifikasi sekitar empat lokasi yang diduga dijadikan posko. Kepolisian masih mendalami aktivitas di tempat-tempat tersebut sebelum mengungkap hasil penggeledahan secara menyeluruh.

"Itu ada sekitar empat posko. Nanti lengkapnya akan kami sampaikan pada saat press conference nanti," ujarnya.

Di salah satu rumah di Bogor yang diduga dijadikan posko oleh Kombes IM, penyidik menemukan indikasi adanya perbuatan permulaan yang berkaitan dengan dugaan makar.

Temuan itu menjadi perhatian penyidik karena dinilai dapat memperkuat konstruksi perkara, terutama untuk menelusuri apakah aktivitas di lokasi tersebut telah melampaui tahap persiapan.

"Posko yang menjadi dugaan pemufakatan pada perbuatan permulaan perbuatan, sehingga kami berharap konstruksi yang kami bangun terkait dengan tindak pidana makar ini menjadi sempurna," ucap Susatyo.

Dalam penggeledahan tersebut, penyidik turut menyita sejumlah dokumen dan spanduk. Barang bukti itu akan didalami untuk mengungkap hubungan antara aktivitas di posko dengan dugaan tindak pidana yang sedang disidik.

Bareskrim sebelumnya telah menjelaskan tiga fokus dalam membangun konstruksi perkara dugaan makar. Ketiganya meliputi perbuatan persiapan, pemufakatan yang dimulai dari tahap persiapan, serta permulaan pelaksanaan perbuatan yang diduga sebagai makar.

Susatyo menegaskan, dugaan serangan yang menjadi bagian dari konstruksi penyidikan tidak terbatas pada serangan fisik. Serangan nonfisik, termasuk melalui ruang siber, juga menjadi bagian yang didalami.

"Intinya adalah berkaitan dengan permulaan perbuatan. Jadi sudah pernah kami sampaikan bahwa makar itu sesuai dengan Pasal 160 adalah niat untuk melakukan serangan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Emak-Emak Geruduk DPR Besok, Desak Gibran Kembalikan Fasilitas Negara

Oleh Redaksi · 22 Nov, 18.10 WIB



BANDA ACEH - Emak-Emak Bergerak Lintas Provinsi berencana mendatangi Gedung DPR RI, Senin (23/11/2026) besok. Mereka menuntut Gibran Rakabuming Raka agar mengembalikan fasilitas negara yang pernah diterima selama menjabat sebagai wakil presiden.

Koordinator aksi, Merry alias Bunda Merry, mengatakan unjuk rasa sekaligus permintaan audiensi tersebut akan melibatkan emak-emak dari sejumlah daerah. Mereka berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga Sumatera Selatan.

Salah satu tuntutan yang akan disampaikan yakni mempertanyakan sikap DPR RI yang dinilai belum menindaklanjuti rencana penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik Gibran.

"Maka kami dari emak-emak bergerak lintas provinsi, nanti akan menyuarakan kami akan meminta DPR RI, mana suaranya kenapa HMP itu tidak jadi dilaksanakan," kata Merry dalam konferensi pers di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (22/11/2026).

Selain persoalan HMP, Merry juga menyinggung putusan Mahkamah Agung (MA) terkait Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan Gibran serta putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai persoalan persyaratan pendidikan dalam pencalonannya sebagai wakil presiden.

Atas dasar tersebut, dia menuntut pengembalian fasilitas negara dan uang yang telah diterima Gibran selama menjabat. Merry juga mempersoalkan hak Gibran atas uang pensiun sebesar Rp20 juta per bulan karena menurutnya masa jabatan yang dijalani baru sekitar 2 tahun.

"Ketika tidak memenuhi syarat menjadi Wakil Presiden maka seharusnya Gibran mengembalikan apa yang sudah dia terima, bahkan gaji bulanannya itu kembalikan ke negara," katanya.

Merry menegaskan, pihaknya akan terus menyuarakan tuntutan apabila DPR RI tidak mengakomodasi permintaan audiensi tersebut. Bahkan, mereka berencana menginap di Gedung DPR RI hingga aspirasi mereka diterima.

"Jika kami tidak diakomodir, maka kami sebagai rakyat punya hak untuk bermalam di rumah rakyat yaitu Gedung DPR RI sampai diterima aspirasi kami," ucapnya

NASIONAL

Partai Koalisi Tak Berebut Kursi Wapres, Said Didu Duga Prabowo Sedang Dijebak

Oleh Redaksi · 21 Nov, 12.17 WIB

BANDA ACEH -- Pengamat kebijakan publik Muhammad Said Didu menduga bahwa partai-partai koalisi pemerintah sedang menjebak Presiden Prabowo Subianto terkait pemilihan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.Ia menyoroti anomali sikap partai-partai koalisi yang tidak berebut kursi cawapres dan justru menyerahkannya kepada Partai Gerindra.

Sikap tersebut terjadi di tengah elektabilitas Prabowo yang semakin menurun. Oleh sebab itu, Said Didu menganalogikan bahwa partai-partai koalisi ingin 'turun dari mobil'.

"Ini kan begini, di tengah-tengah survei terhadap elektabilitas Prabowo yang makin turun. Nah, saya takutnya ini jebakan malah. Jebakan kepada Presiden karena partai-partai juga yang berkoalisi Presiden anjlok loh surveinya," ujarnya dalam kanal YouTube Hersubeno Point, dikutip Sabtu (21/11).

Said Didu berpendapat bahwa partai-partai koalisi mulai khawatir elektabilitas mereka ikut merosot jika terus berada dalam pemerintahan bersama Prabowo. Ia bahkan menyebut PAN memiliki tingkat elektabilitas paling rendah dibandingkan partai lainnya.

"Artinya dia pikir oh kalau kita sama-sama terus ini kita anjlok nih, ya kan? Apalagi PAN paling rendah tuh," lanjutnya.

Ia pun menyinggung pernyataan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), yang menyerahkan pemilihan pengganti Gibran kepada Partai Gerindra

"Nah, sehingga yang pertama keluar menyatakan kami serahkan ke Gerindra. Itu kan ketua umum PAN. Zulkifli Hasan baru keluar dari istana sudah ngomong," tandasnya.

Sebelumnya, Zulhas mengungkapkan bahwa hampir seluruh ketua umum partai Politik koalisi pemerintah sepakat untuk tidak mengajukan kader dari partai masing-masing …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Mutasi Besar-besaran Polri! 117 Kapolres dan Kapolresta Berganti, Ini Daftar Lengkapnya

Oleh Redaksi · 22 Nov, 18.28 WIB



BANDA ACEH - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melakukan mutasi dan rotasi besar-besaran di lingkungan Polri. Sebanyak 117 pejabat yang tercantum dalam daftar mutasi mendapat penugasan baru sebagai Kapolres hingga Kapolresta di berbagai wilayah Indonesia.

Mutasi tersebut tertuang dalam dua surat telegram rahasia (TR), yakni Nomor ST/2598/XI/KEP/2026 dan ST/2599/XI/KEP/2026 tertanggal 20 November 2026. Kedua surat itu ditandatangani Kapolri atas nama Asisten SDM Kapolri, Irjen Deni Dharmapala.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, mutasi jabatan merupakan bagian dari penyegaran organisasi. Pergantian posisi di lingkungan kepolisian juga menjadi hal yang wajar dalam dinamika organisasi.

Dia menegaskan, penempatan personel dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas.

"Penempatan personel dalam jabatan di lingkungan Polri dilaksanakan dengan mempertimbangkan meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas. Hal ini merupakan bagian dari upaya organisasi untuk memastikan setiap personel dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal," kata Isir dalam keterangannya, Minggu (22/11/2026).

Isir juga meminta para personel yang mendapat jabatan baru segera beradaptasi dan menjalankan tugas secara profesional.

"Setiap jabatan merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara profesional. Kami berharap para pejabat yang mendapat penugasan baru dapat menjaga integritas, meningkatkan kinerja, serta menghadirkan pelayanan kepolisian yang responsif dan bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Faftar 117 Kapolres dan Kapolresta yang mendapat jabatan baru dalam mutasi Polri November 2026:

1. Kombes Ronny Lumban Gaol diangkat sebagai Kapolres Metro Jakarta Pusat
2. AKBP Davis Busin Siswara diangkat sebagai Kapolresta Pati
3. AKBP Willy Andrian diangkat sebagai Kapolresta Bogor Kota
4. Kombes Irwan Andy Purnamawan diangkat sebagai Kapolresta Sumenep
5. AKBP Yudha Setiawan diangkat sebagai Kapolresta OKU Selatan
6. AKBP Faidil Zikri diangkat sebagai Kapolresta Padang
7. Kombes Imam Tarmudi diangkat sebagai Kapolresta Bukittinggi
8. Kombes Gregorius Liliek Tribhawono Iryanto diangkat sebagai Kapolresta Pontianak
9. Kombes Ary Sudradjat diangkat sebagai Kapolresta Batang
10. AKBP Supriadi Rahman diangkat sebagai Kapolresta Gowa
11. AKBP Rulian Syauri diangkat sebagai Kapolres Manggarai Barat
12. AKBP Emerich Simangungsong diangkat sebagai Kapolres Malang
13. Kombes Pol. Anggun Cahyono diangkat sebagai Kapolresta Palu
14. AKBP Haryo Basuki diangkat sebagai Kapolres Pinrang
15. AKBP Mugia Yarry Junanda diangkat sebagai Kapolres Jeneponto

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Sudah Dipecat Tidak Hormat, Kenapa Ahrie Sonta – Eko Hadi Masih Aktif di Polri dan Dimutasi ke Yanma?

Oleh Redaksi · 22 Nov, 18.21 WIB



BANDA ACEH - Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso, yang telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, tetap berstatus aktif di lingkungan Polri dan baru-baru ini dimutasi menjadi Perwira Tinggi (Pati) Yanma Polri.Mutasi tersebut tercantum dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2598/XI/KEP/2026 tertanggal 20 November 2026 yang ditandatangani Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Ahrie Sonta, yang sebelumnya menjabat Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, dicopot dan digantikan Brigjen Iksantyo Bagus Pramono. Eko Hadi Santoso, sebelumnya Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri, juga dialihkan ke Pati Yanma. Irjen Slamet Uliandi turut dimutasi ke posisi serupa.

Status PTDH Belum Final karena Banding

Kedua jenderal tersebut sebelumnya menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri. Ahrie Sonta dijatuhkan PTDH pada 10 November 2026 setelah persidangan selama sekitar 11 jam. Eko Hadi menyusul pada 17 November 2026 setelah sidang sekitar sembilan jam. Majelis menilai keduanya melakukan perbuatan tercela, antara lain menyalahgunakan akses perangkat teknologi Polri untuk penyadapan yang tidak sesuai prosedur.

Keduanya mengajukan banding. Polri telah menyatakan akan membentuk majelis komisi banding. Selama proses banding berlangsung, secara administrasi mereka masih berstatus anggota Polri sehingga dapat dimutasi. Keduanya tetap ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, terkait perkara pidana.

Yanma sebagai Tempat Mutasi Non-Struktural

Yanma (Pelayanan Markas) Polri adalah unsur pelayanan di tingkat Mabes Polri yang mengurus tugas administratif, pelayanan markas, angkutan, perumahan, protokoler, dan penjagaan markas. Jabatan Pati Yanma bersifat non-struktural dan kerap digunakan untuk menempatkan perwira yang sedang menghadapi persoalan hukum atau etika, sambil proses administrasi selesai.

Kronologi Kasus

Kasus berawal dari penetapan empat perwira tinggi sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal nomor telepon Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara, tokoh Politik, media, ormas, LSM, dan pengusaha. Keempatnya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (kini Kepala Kantor Staf Presiden), Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi. Penyidikan juga berkembang ke dugaan tindak pidana makar.

Mutasi ini bagian dari rotasi besar-besaran yang melibatkan ratusan perwira. Polri menegaskan mutasi merupakan dinamika organisasi yang wajar. Proses etik banding dan penyidikan pidana terus berjalan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Ketua DPD Malah Usul Prabowo Punya Tiga Wapres: Barat, Tengah dan Timur

Oleh Redaksi · 21 Nov, 16.34 WIB

BANDA ACEH - Satu kursi wakil presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka belum juga terisi. Presiden Prabowo Subianto bahkan belum mengumumkan dua nama calon penggantinya untuk diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Namun, di tengah penantian tersebut, muncul usulan yang tak biasa dari Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin.Bukan sekadar mengusulkan siapa yang layak mendampingi Prabowo, Sultan justru mewacanakan agar Indonesia memiliki tiga wakil presiden sekaligus. Alasannya, wilayah Indonesia terlalu luas dan memiliki persoalan pembangunan yang berbeda-beda untuk ditangani dengan pola kepemimpinan yang selama ini berlaku.

Gagasan tersebut disampaikan Sultan saat menanggapi dinamika pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

"Indonesia adalah Negara Kepulauan yang sangat luas secara geografis, dan tentunya cukup kompleks dari sisi sosiologis. Setiap wilayah baik bagian Barat, Tengah Dan Timur Indonesia memiliki karakter kebutuhan dan tantangan yang berbeda," ujar Sultan kepada wartawan, dikutip Sabtu (21/11/2026).

Menurut Sultan, kondisi geografis dan keragaman kebutuhan daerah semestinya menjadi pertimbangan dalam merancang kepemimpinan nasional. Terlebih, berbagai persoalan pembangunan di daerah masih membutuhkan dukungan dan perhatian pemerintah pusat.

Karena itu, DPD kembali menggulirkan gagasan agar jumlah wakil presiden tidak lagi dibatasi satu orang, melainkan dapat ditambah hingga maksimal tiga orang.

Menariknya, Sultan bahkan sudah memiliki gambaran wilayah penempatan ketiga wakil presiden tersebut. Mereka diusulkan berkantor di Papua, Kalimantan, dan Sumatera.

"Ini merupakan usulan lama kami, namun saya kira masih relevan untuk diwacanakan di saat bangsa ini sedang mencari sosok Wapres yang baru. Agar ke depan kita ingin para wapres ini dapat berkantor di Papua, Kalimantan dan Sumatera," tegasnya.

Sultan beralasan, agenda pemerintahan yang harus ditangani Presiden semakin banyak. Karena itu, menurutnya, diperlukan beberapa wakil presiden yang mampu menerjemahkan visi Presiden sekaligus memastikan program pembangunan berjalan hingga ke daerah.

Para wakil presiden tersebut diharapkan dapat mengawal pelaksanaan program pemerintah dan memahami kebutuhan masyarakat di wilayah tugas masing-masing.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Anas Urbaningrum Cium Ada Lobi di Balik Pengusulan Cawapres, Prabowo Diminta Waspada

Oleh Redaksi · 21 Nov, 17.47 WIB

BANDA ACEH - Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum menilai terdapat proses lobi menjelang pengusulan dua nama calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.Anas mengatakan lobi tersebut dilakukan di belakang layar karena secara resmi tidak ada partai Politik yang mengajukan nama secara terbuka untuk menjadi pendamping Presiden Prabowo Subianto.

"Menjelang usulan 2 nama Cawapres, memang secara formal tidak ada parpol yang secara resmi (baca : terbuka) mengajukan nama. Tetapi di bawah meja, ternyata tetap ada yang usreg sedemikian rupa," tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Sabtu (21/11).

Ia kemudian mengungkapkan bahwa proses tersebut dilakukan dengan cara yang terselubung.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Aseng Ditangkap, Febrie Diamputasi Usai Usik Bisnis Haram Listyo

Oleh Redaksi · 22 Nov, 13.27 WIB



BANDA ACEH – Dugaan konflik kepentingan di balik penindakan mafia pertambangan ilegal kembali menjadi sorotan.

Nama mantan Jampidsus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, diseret dalam polemik yang menghubungkan penanganan perkara tambang ilegal milik Sudianto alias Aseng dengan dugaan bisnis pertambangan yang disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan keluarga mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Aseng selama bertahun-tahun disorot terkait dugaan aktivitas pertambangan emas dan bauksit ilegal di Kalimantan Barat.

Praktisi dan pengamat militer Sri Radjasa bahkan melontarkan tudingan bahwa pengusaha tersebut diduga memiliki jaringan perlindungan kuat, termasuk dugaan keterkaitan dengan Listyo Sigit dan anak perempuannya.

Dugaan tersebut kembali mencuat setelah Sri Radjasa membahas perkara Aseng dalam sejumlah podcast yang beredar di media sosial.

Ia menyebut bisnis pertambangan yang dikaitkan dengan Aseng tidak hanya berada di Kalimantan Barat, tetapi juga diduga memiliki hubungan dengan aktivitas pertambangan di Halmahera dan Sulawesi.

Dalam podcast @abrahamsamadspeakup, Sri Radjasa secara terbuka menyinggung dugaan keterlibatan anak perempuan Listyo Sigit dalam bisnis pertambangan.

“Kasus Aseng, kasusnya yang tambang di mana itu, illegal mining, ternyata ada nama anaknya Sigit yang perempuan. Sebelumnya di Halmahera dia juga main, main tabrak aja tambang orang-orang lain."

"Dan ini kalau di sini ada 500 tambang, mungkin Sigit terima setoran 400 tambang disetor ke dia. Ngeri ya, penyalahgunaan kewenangan dia sudah sangat luar biasa, di sektor tambang dan di sektor lainnya. Dan berapa tahun dia jadi Kapolri,” kata Sri Radjasa pada Minggu (22/11/2026) di Podcast Abraham Samad.

Pernyataan tersebut semakin tajam ketika Sri Radjasa menghubungkan penindakan Aseng oleh Kejaksaan Agung dengan dugaan konflik kepentingan yang menyeret nama Febrie Adriansyah.

Dia pun menyebut penindakan terhadap Aseng diduga menjadi salah satu pemicu persoalan yang kemudian menyeret mantan Jampidsus tersebut.

“Kenapa Febri (Febrie Adriansyah, mantan Jampidsus Kejagung) harus diamputasi, karena Febri sudah berani mengusik bisnis haramnya Kapolri. Salah satunya Aseng (Sudianto) ditangkap."

"Aseng ini bandar emas ilegal paling gede. Nah, di kubu Aseng ini ada anak Kapolri (Listyo Sigit) yang perempuan, dan itu saya faktanya dari Febri loh. Nah, begitu si Aseng kena, mulai panik mereka,” ujar Sri Radjasa.

Sri Radjasa kembali menyebut nama Listyo Sigit dan mantan Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol. Pipit Rismanto dalam podcast @oborrakyatreborn.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Bukan Dasco, Mahfud MD Sarankan Prabowo Pilih Cawapres Senior Nonpartai Ini

Oleh Redaksi · 21 Nov, 12.02 WIB

BANDA ACEH - Mahfud MD menyarankan Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan tokoh senior nonpartai sebagai calon wakil presiden (cawapres) untuk mengisi posisi yang kosong. Menurut Mahfud, sosok tersebut sebaiknya memiliki pengalaman mengurus pemerintahan, tetapi tidak memiliki ambisi untuk mengejar jabatan Politik.Pandangan itu disampaikan Mahfud saat berbincang dengan ekonom Rhenald Kasali di kanal YouTube Rhenald Kasali pada 19 November 2026. Ia menjawab pertanyaan Rhenald mengenai kriteria wakil presiden yang dibutuhkan Prabowo, apakah lebih mengutamakan kecocokan personal atau kompetensi.

"Menurut saya kalau situasinya seperti sekarang, saya berpikir dicari seorang senior yang tidak pernah punya afiliasi politik ya, tapi ikut mengurus pemerintahan. Tidak pernah atas kehendaknya sendiri ngurus kontestasi politik. Dia enggak punya kepentingan, tidak ingin jadi apa-apa," ujar Mahfud.

Untuk menggambarkan sosok yang dimaksud, Mahfud menyebut mantan Wakil Presiden Boediono dan ekonom peraih Nobel asal Bangladesh, Muhammad Yunus. Ia menilai figur seperti itu dapat ditemukan di lingkungan akademisi, termasuk kampus-kampus.

"Orang seperti Pak Boediono. Pak Boediono kan tidak punya masalah. Ngurus saja, 'saya dicalonkan ya sudah ya maju', tapi dia kan tidak punya afiliasi politik. Dan orang seperti ini mungkin masih banyak di kampus-kampus, di mana orang-orang besar yang selama ini ngomong," jelasnya.

Mahfud juga menilai pilihan terhadap tokoh senior nonpartai dapat memberikan keuntungan bagi Partai Gerindra. Menurut dia, sosok yang memiliki kredibilitas tetapi tidak mempunyai basis politik sendiri tidak akan menjadi ancaman bagi partai maupun koalisi pendukung pemerintah.

"Saya kira itu Gerindra-nya aman. Jadi kredibilitas, walaupun dia tidak mempunyai basis dan kekuatan politik, enggak perlu karena basisnya ada di presiden dan koalisinya. Dan koalisi itu pasti tidak akan mengganggu orang ini karena orangnya presiden," papar Mahfud.

Dalam perbincangan tersebut, Mahfud turut menyoroti belum adanya partai politik yang mengajukan nama cawapres. Ia menduga partai-partai koalisi telah membaca arah pilihan Prabowo. Menurut analisisnya, presiden kemungkinan akan memilih tokoh nasional nonpartai atau kader dari partainya sendiri, bukan berasal dari partai politik lain.

Sesuai mekanisme konstitusi yang disebut dalam uraian tersebut, Prabowo dijadwalkan menyerahkan sedikitnya dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) paling lambat 14 hari sebelum sidang.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

DeMul Ikut Hadiri Pertemuan Elite Parpol dengan Prabowo di Hambalang

Oleh Redaksi · 22 Nov, 20.38 WIB



BANDA ACEH - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ikut dalam pertemuan sejumlah elite partai Politik (parpol) koalisi dengan Presiden Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (22/11/2026).Dedi hadir bersama sejumlah elite Partai Gerindra di tengah persiapan pengajuan dua nama calon wakil presiden (cawapres) kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Pertemuan berlangsung di Padepokan Garudayaksa, Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, sejak Minggu (22/11/2026) siang.

Selain Dedi Mulyadi, sejumlah tokoh yang hadir yakni Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Komisi IV DPR RI yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Titiek Soeharto.

Hadir pula Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait serta Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak.

Rombongan tersebut terlihat meninggalkan kediaman Prabowo sekitar pukul 18.00 WIB setelah mengikuti pertemuan yang berlangsung sejak siang hari.

Namun, belum ada keterangan resmi mengenai agenda maupun materi pembicaraan dalam pertemuan tersebut.

Pertemuan itu berlangsung menjelang batas waktu penyerahan dua nama calon wakil presiden kepada MPR RI. Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan Prabowo memiliki waktu hingga Rabu (25/11/2026) untuk menyerahkan kedua nama tersebut.

MPR RI telah menjadwalkan sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden pada 9 Desember 2026. Jadwal tersebut berubah dari rencana sebelumnya, yakni 2 Desember 2026.

NASIONAL

Ini Empat Posko Diduga Jadi Markas Makar

Oleh Redaksi · 22 Nov, 08.22 WIB



BANDA ACEH -Bareskrim Polri mengungkap empat lokasi yang diduga menjadi pusat aktivitas dugaan makar serta penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Empat posko tersebut ditemukan setelah penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di sejumlah titik di Jakarta, Bogor, dan Tangerang.

"Ada sekitar empat posko. Nanti lengkapnya akan kami sampaikan pada saat press conference nanti," kata kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro pada Sabtu, 21 November 2026.

Di salah satu rumah di Bogor yang diduga dijadikan posko, penyidik menemukan indikasi adanya perbuatan permulaan yang berkaitan dengan dugaan makar.

Temuan itu menjadi perhatian penyidik karena dinilai dapat memperkuat konstruksi perkara, terutama untuk menelusuri apakah aktivitas di lokasi tersebut telah melampaui tahap persiapan.

"Posko yang menjadi dugaan pemufakatan pada perbuatan permulaan perbuatan, sehingga kami berharap konstruksi yang kami bangun terkait dengan tindak pidana makar ini menjadi sempurna," kata Susatyo.

Adapun fokus dalam konstruksi perkara dugaan makar terjadi menjadi tiga bagian. Pertama perbuatan persiapan, kedua, pemufakatan mulai, dan terakhir yang ketiga permulaan perbuatan dugaan makar tersebut.

NASIONAL

Yaqut Cholil Qoumas Tak Menyesal Terjerat Kasus Kuota Haji Tambahan, Singgung Nasib Penjual Sayur

Oleh Redaksi · 22 Nov, 13.43 WIB



BANDA ACEH – Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut menyatakan tidak menyesali keputusan membagi kuota haji tambahan 2024.

Meski kebijakan tersebut kini membuatnya harus menghadapi proses hukum sebagai terdakwa, ia menyebut keputusan kuota haji diambil atas dasar niat baik untuk melindungi keselamatan jemaah.

Gus Yaqut menyatakan telah mengabdikan dirinya untuk melayani jemaah haji Indonesia sejak awal menjabat sebagai Menteri Agama. Ia mengaku siap menanggung segala konsekuensi, termasuk mempertaruhkan dirinya, demi memastikan masyarakat yang telah menabung selama puluhan tahun dapat menunaikan ibadah haji dengan aman.

Pernyataan tersebut disampaikan Gus Yaqut saat menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (20/11) malam.

Gus Yaqut menyampaikan, kebijakan selama dirinya memimpin Kementerian Agama selalu berpedoman pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Ia juga menyebut pelaksanaan administrasi kebijakan mengacu pada KMA Nomor 777 Tahun 2016.

Menurutnya, ada dua prinsip mendasar yang selalu ditekankan kepada seluruh jajaran Kementerian Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji, yakni kepatuhan terhadap aturan dan kebermanfaatan bagi masyarakat.

"Jangan pernah sekali-kali melakukan pelanggaran atas dua prinsip utama ini. Karena dua prinsip penting dalam menjalankan pemerintahan dalam hal pelaksanaan ibadah haji," kata Gus Yaqut.

Ia mengklaim, telah berulang kali mengingatkan jajarannya agar tidak melakukan pungutan dalam bentuk apa pun kepada jemaah. Selain itu, dirinya juga menerbitkan sejumlah surat edaran sebagai peringatan agar pegawai Kementerian Agama tidak melakukan kecurangan maupun penyimpangan dalam memberikan pelayanan.

Gus Yaqut juga membantah pernah menerima laporan mengenai pemberian uang secara tidak sah ataupun persoalan pengaturan antrean keberangkatan haji.

"Sama sekali tidak ada, Yang Mulia. Saya malah baru tahu setelah hal ini ramai. Saya tidak pernah mendapatkan laporan apa pun mengenai penerimaan-penerimaan yang tidak sah," ujarnya.

Ia pun membantah pernah menggunakan staf khusus untuk mengatur keberangkatan jemaah demi memperoleh keuntungan pribadi. Ia menegaskan, tidak pernah memanfaatkan jabatannya untuk mengintervensi proses tersebut.

Adik dari mantan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf itu merasa tidak menyesal atas jabatan Menteri Agama hingga dirinya didakwa menerima uang sekitar USD 271.000 serta menggunakan kewenangannya sebagai Menteri Agama untuk menguntungkan pihak lain.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Selamat Ginting Bongkar Penyusupan di Istana dalam Dugaan Penyadapan Presiden

Oleh Redaksi · 21 Nov, 19.36 WIB

BANDA ACEH - Pengamat Politik dan militer Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting, menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto tidak bisa dilihat sebagai persoalan teknis intelijen semata. Menurutnya, jika penyadapan benar terjadi, kemungkinan adanya penyusupan dari dalam lingkaran Istana harus ikut ditelusuri.Selamat mempertanyakan bagaimana pihak luar bisa memperoleh akses terhadap komunikasi Presiden, sementara sistem pengamanan kepala negara memiliki prosedur dan perangkat komunikasi khusus.

Ia mengaku pernah menggali informasi dari sejumlah mantan ajudan presiden mengenai penggunaan telepon seluler dalam lingkungan pengamanan kepala negara.

“Saya tanya kepada para mantan ajudan presiden, bagaimana sistem kerjanya? Kalian memegang berapa HP? Mereka menjawab, masing-masing memegang beberapa HP khusus,” kata Selamat di Podcast Forum Keadilan Madilog, Sabtu (21/11/2026).

Menurutnya, penggunaan sejumlah perangkat komunikasi khusus tersebut semestinya membuat akses terhadap komunikasi Presiden tidak mudah ditembus pihak luar.

Karena itu, jika dugaan penyadapan terhadap Presiden terbukti, Selamat menilai penyelidikan tidak boleh berhenti pada pihak yang diduga melakukan penyadapan. Orang-orang yang memiliki akses ke lingkungan Istana juga harus diperiksa.

“Kalau kemudian Presiden disadap, berarti kemungkinan ada penyusupan yang dilakukan dari dalam. Harus ada orang di dalam Istana yang juga diperiksa,” tegasnya.

Selamat juga mengungkit penemuan bunker atau tempat penyimpanan senjata di sebuah sekolah di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Menurutnya, hingga kini masih terdapat sejumlah pertanyaan yang belum mendapatkan penjelasan secara terang kepada publik.

Ia mempertanyakan kemungkinan adanya persiapan logistik di Jakarta apabila memang terdapat gerakan yang mengarah pada upaya makar.

“Kalau makar, kan di Jakarta. Tidak jauh dari sini ada tempat penyimpanan logistik, entah itu uang, amunisi, atau emas yang sudah disiapkan,” ujarnya.

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa Selamat melihat persoalan penyadapan, dugaan penyusupan, dan penemuan tempat penyimpanan senjata sebagai sejumlah persoalan yang perlu ditelusuri secara menyeluruh.

Selamat kemudian mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kemungkinan adanya pihak-pihak yang berusaha memengaruhi atau menghambat pengungkapan perkara.

Ia mengaku pernah menyampaikan sejumlah nama lebih awal melalui pemberitaan karena khawatir informasi yang berkembang justru berhenti di tengah jalan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Prabowo Kumpulkan Petinggi Partai Koalisi di Hambalang, Bahas Cawapres

Oleh Redaksi · 22 Nov, 20.19 WIB



BANDA ACEH -Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mengumpulkan sejumlah petinggi dan kader partai koalisi di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu, 22 November 2026.

Pertemuan tersebut dikabarkan berkaitan dengan pembahasan dua nama calon Wakil Presiden (Cawapres).

Sejumlah petinggi dan kader Gerindra tampak mulai berdatangan ke Hambalang sejak siang hari. Mereka di antaranya Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Mochamad Iriawan, Fadli Zon, Irfan Yusuf, Maruarar Sirait serta Dahnil Anzar Simanjuntak juga tiba di lokasi.

Pada Minggu pagi, Bahlil mengungkap ada rencana pertemuan dengan Presiden hari ini untuk membahas proses penyusunan dua nama calon Wakil Presiden yang nantinya diserahkan Presiden kepada MPR.

Agenda itu rencananya melibatkan empat partai pengusung, yakni Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat, serta partai lain yang tergabung dalam koalisi.

"Dalam rangka membahas proses daftar dua nama yang akan diserahkan oleh Presiden kepada MPR sebagai calon Wakil Presiden," ujar Bahlil seusai Golkar Run.

Terkait kandidat yang akan diusulkan Golkar, Bahlil mengaku partainya memiliki sejumlah preferensi, meski keputusan akhir berada di tangan Prabowo.

"Siapa namanya, itu hanya yang tahu Bapak Presiden sama Yang Maha Kuasa. Kita sifatnya menyampaikan aspirasi," pungkas Bahlil.

NASIONAL

Kapolri Mutasi Pejabat Polri, Sejumlah Kapolda Berganti

Oleh Biro Meulaboh · 22 Nov, 12.02 WIB



Lambang Rastra Sewakottama, simbol dedikasi dan pengabdian Kepolisian Negara Republik Indonesia,FOTO/ist

JAKARTA – Kapolri melakukan rotasi dan mutasi sejumlah perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) Polri melalui Surat Telegram Nomor ST/2598/XI/KEP/2026 tertanggal 20 November 2026.

Mutasi tersebut mencakup sejumlah jabatan strategis di lingkungan Mabes Polri, kewilayahan, hingga lembaga pendidikan dan fungsi operasional kepolisian.

Dalam surat telegram tersebut, sejumlah pejabat berpangkat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) mendapat penugasan baru. Di antaranya Irjen Pol Alfred Papare yang ditunjuk sebagai Kapolda Papua, menggantikan penugasan sebelumnya.

Selain itu, Irjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin dipercaya sebagai perancang peraturan kepolisian utama tingkat I di Divisi Hukum Polri. Sementara Irjen Pol Eko Hadi Santoso dimutasikan sebagai Pati Yanma Polri.

Rotasi juga menyentuh sejumlah jabatan pimpinan kepolisian daerah. Irjen Pol Yudhi Sulistiyanto Wahid ditunjuk sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama, sedangkan Brigjen Pol Augustinus Berlianto Pangaribuan dipercaya menjabat Kapolda Bengkulu.

Di jajaran lainnya, Irjen Pol Langgeng Purnomo ditunjuk sebagai Kapolda Sulawesi Tenggara. Sementara Irjen Pol Slamet Uliandi dimutasikan sebagai Pati Yanma Polri.

Mutasi tersebut juga mencakup sejumlah posisi di lingkungan Korbrimob, Bareskrim, Baharkam, Divhubinter, serta lembaga pendidikan Polri.

Rotasi dan mutasi jabatan ini tertuang dalam surat telegram yang ditandatangani Kapolri dan menjadi bagian dari penyegaran organisasi serta penataan jabatan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.[]

Editorial: Biro Meulaboh.

NASIONAL

Kapolri Suyudi Kocok Ulang Polda di Tengah Skandal Penyadapan dan Dugaan Makar

Oleh Redaksi · 22 Nov, 13.33 WIB



BANDA ACEH — Gerbong mutasi kembali bergerak di tubuh Polri. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto merombak 12 jabatan strategis di tingkat kepolisian daerah. Enam posisi Kapolda dan enam jabatan Wakapolda mengalami pergantian.

Rotasi besar ini berlangsung ketika institusi Bhayangkara tengah menghadapi dua ujian serius, yakni dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan penyidikan dugaan makar merambah sejumlah daerah melalui serangkaian penggeledahan yang menyita perhatian publik.

Mutasi tersebut, tertuang dalam Telegram Rahasia (TR) Nomor ST/2598/XI/KEP/2026 tertanggal 20 November 2026. Surat itu ditandatangani Asisten SDM Kapolri Irjen Pol Deni Dharmapala.

Sebanyak enam perwira tinggi mendapat penugasan baru sebagai Kapolda. Sementara enam jabatan Wakapolda juga mengalami pergantian.

Secara administratif, Polri menyebut rotasi sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan pembinaan karier. Namun, di tengah persoalan hukum yang menyeret nama sejumlah personel dan menguji kredibilitas institusi, pergantian pejabat di sejumlah wilayah strategis juga menghadirkan tuntutan lebih besar yakni pembenahan kinerja, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menegaskan, penempatan personel dilakukan berdasarkan prinsip meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas.

"Penempatan personel dalam jabatan di lingkungan Polri dilaksanakan dengan mempertimbangkan meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas. Hal ini merupakan bagian dari upaya organisasi untuk memastikan setiap personel dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal," ujar Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (22/11/2026).

Pernyataan tersebut, menjadi penegasan resmi institusi bahwa mutasi merupakan bagian dari mekanisme penguatan organisasi. Namun, tantangan Polri saat ini jauh lebih besar daripada sekadar pergantian jabatan.

Perombakan menyentuh sejumlah wilayah strategis, mulai dari Papua, Papua Barat, Bengkulu, Sulawesi Tenggara, DI Yogyakarta, hingga Kalimantan Selatan.

Di Papua, Irjen Petrus Patridge Rudolf Renrawin digantikan Irjen Alfred Papare. Posisi yang ditinggalkan Alfred sebagai Kapolda Papua Barat selanjutnya dipercayakan kepada Irjen Edfrie R. Maith.

Di Bengkulu, jabatan Kapolda yang sebelumnya dipegang Irjen Yudhi Sulistianto Wahid kini dipercayakan kepada Brigjen Agustinus Berlianto Pangaribuan.

Sementara itu, Kapolda Sulawesi Tenggara akan dijabat Irjen Langgeng Purnomo. Ia menggantikan Irjen Himawan Bayu Aji yang mendapat penugasan sebagai Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat I Densus 88 Antiteror Polri.

Untuk DI Yogyakarta, jabatan Kapolda dipercayakan kepada Irjen Abioso Seno Aji.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Masih Ingat Kata-kata Prof Gema? Langkahi Mayat Kami kalau Gibran Turun

Oleh Redaksi · 21 Nov, 15.01 WIB

BANDA ACEH - -- Publik masih terngiang-ngiang dengan pernyataan seorang Profesor bernama Gema Goeyardi yang meyakini Gibran Rakabuming Raka tidak bakal diturunkan dari jabatannya.Untuk diketahui, Gibran resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI pada 12 November 2026, sehingga hingga 20 November 2026 sudah berlalu 8 hari.

Prof. Gema beberapa waktu lalu menyampaikan pandangan berbeda mengenai cara Gibran menghadapi desakan agar dirinya turun dari jabatan.

Gema menyarankan Gibran tidak terlalu bergantung pada dukungan partai Politik maupun kekuatan parlemen.

Kata dia, ada hal lain yang dinilai lebih penting, yakni dukungan langsung dari masyarakat atau people power.

Ia bahkan membayangkan Gibran bisa mendapatkan dukungan jutaan orang apabila mampu menunjukkan keberpihakan kepada rakyat melalui tindakan nyata.

Gema menyinggung fenomena viralitas di Indonesia yang kerap dikaitkan dengan perjuangan masyarakat mencari keadilan.

"Indonesia ini kan katanya no viral no justice kan? No justice. Ini untuk semua masyarakat," ujar Gema, dikutip fajar.co.id, Jumat (20/11/2026).

Ia kemudian menyarankan agar pesan tersebut disampaikan langsung kepada Gibran.

"Saran saya tolong disampaikan kepada Pak Gibran. Anda tidak perlu dukungan Pak Gibran, dukungan parlemen dukungan partai anda tidak perlu," tukasnya.

Baginya, dukungan parlemen dan partai bukan satu-satunya kekuatan yang bisa menjadi sandaran seorang wakil presiden.

"Yang Anda butuhkan adalah dukungan people power," imbuhnya.

"'Kalo Gibran turun, langkahi mayat kami.."

Hahahaha🤣🤣

https://t.co/p3Bb3M1avx

— cicag di Dinding (@creeping5ilence) November 20, 2026

Lebih lanjut, Gema menggambarkan bahwa dukungan masyarakat bisa diperoleh apabila Gibran turun langsung dan memperlihatkan keberpihakan kepada kepentingan rakyat.

Ia kemudian menyinggung sejumlah tokoh yang menurutnya pernah melakukan hal serupa, mulai dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, hingga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM.

"Kalau hari ini Anda turun dan benar-benar mewakili rakyat seperti apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, di awal-awal itu, pada saat itu," tukasnya.

Gema juga menyebut mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sebagai figur yang dapat menjadi referensi.

"Seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Ahok, seperti yang sudah dilakukan oleh KDM, Bu Susi Pudjiastuti. Dan you join the game dengan skala yang lebih besar," tuturnya.

NASIONAL

Diduga Ada Tujuh Nama Lain Bakal Jadi Tersangka Penyadapan

Oleh Redaksi · 22 Nov, 08.28 WIB



BANDA ACEH -Pengusutan dugaan makar yang disebut berkaitan dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru. Bareskrim Polri mulai mengarahkan pemeriksaan kepada sejumlah tersangka kasus penyadapan untuk dijadikan saksi dalam perkara dugaan makar.

Langkah ini membuka kemungkinan berkembangnya perkara ke sejumlah pihak yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka penyadapan, termasuk nama-nama perwira tinggi Polri.

Bareskrim Polri sebelumnya sudah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto pada periode 2025-2026. Keempat tersangka tersebut adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Merespons hal tesebut, Pengamat Politik dan militer Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting mengatakan, terbuka peluang tujuh nama lain menjadi tersangka. Nama mereka sebelumnya pernah disinggung dalam pembicaraan publik.

Namun, status hukum dan dugaan keterlibatan nama-nama tersebut tetap harus mengacu pada hasil penyidikan aparat penegak hukum.

Lebih jauh, Ginting mempertanyakan kemungkinan pemeriksaan terhadap perwira tinggi, termasuk jenderal bintang empat yang masih aktif.

“Bagaimana kalau yang diperiksa itu bintang empat? Masih ada bintang empat aktif juga yang belum pensiun,” kata Ginting, dikutip dari Podcast Forum Keadilan Madilog, Minggu 22 November 2026

Menurut Ginting, pihak-pihak yang pernah menduduki posisi strategis di lingkungan kepolisian patut dimintai keterangan apabila memiliki informasi mengenai dugaan gerakan yang sedang diselidiki.

Ia mempertanyakan apakah pejabat tinggi kepolisian pada masa itu mengetahui dinamika yang berkembang di internal institusi.

Ginting juga menyinggung Ahrie Sonta Nasution yang disebutnya sebagai peraih Adhi Makayasa. Ia mengkritik sikap loyalitas yang dinilainya berlebihan hingga berpotensi mengabaikan prinsip profesionalisme.

“Ahrie Sonta Nasution itu kan Adhi Makayasa. Tapi loyalitas yang membabi buta. Akhirnya seperti ini,” kata Ginting.

Ginting berpandangan, loyalitas dalam institusi negara tidak boleh ditempatkan di atas hukum dan kepentingan bangsa.

NASIONAL

Pasukan Gibran Desak Raja Juli, Isyana & Giring Lepas Jabatan di Kabinet: Itu Jatah PSI!

Oleh Redaksi · 21 Nov, 11.56 WIB

BANDA ACEH - Ketua Umum Pasukan Gibran Indonesia, Fritz Alor Boy, meminta Raja Juli Antoni, Isyana Bagoes Oka, dan Giring Ganesha mundur dari jabatan menteri dan wakil menteri setelah ketiganya mengundurkan diri dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).Fritz menilai jabatan yang saat ini diemban ketiganya merupakan bagian dari jatah Politik PSI, bukan jabatan pribadi. Karena itu, ia meminta mereka turut melepaskan jabatan di pemerintahan setelah keluar dari partai.

"Raja Juli, Isyana, Giring lepas jabatan menteri dan Wamen! Sebab jabatan tersebut jatah PSI, bukan jatah pribadi. Kalau sudah mundur dari PSI, bagus juga mundur dari jabatan menteri atau wamen. PSI harus dihormati, bukan dikorbankan!," kata Fritz dalam keterangannya, dikutip Jumat (20/11).

Ketiga tokoh tersebut diketahui resmi mengundurkan diri dari PSI pada Senin, 9 November 2026. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI di bawah kepemimpinan Ketua Umum Kaesang Pangarep telah menerima surat pengunduran diri mereka.

Raja Juli Antoni sebelumnya menjabat Sekretaris Jenderal PSI sekaligus Menteri Kehutanan. Ia memutuskan mundur dari jabatan Sekjen dan seluruh aktivitas partai agar dapat fokus membantu Presiden Prabowo Subianto menjalankan pemerintahan.

Sementara itu, Isyana Bagoes Oka yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua Umum DPP PSI sekaligus Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN juga mengundurkan diri dari kepengurusan partai. Isyana menyatakan ingin lebih fokus menjalankan tugas kenegaraan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Polda Metro Tegaskan Penangkapan Eks Kader PSI Cakra Adi Negara Tak Berkaitan dengan Dasco

Oleh Redaksi · 22 Nov, 08.53 WIB



BANDA ACEH - Polda Metro Jaya memberikan penjelasan terkait penangkapan mantan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Cakra Adi Negara, yang juga dikenal sebagai pemilik akun Facebook Cakra Adi Negara (Chakz). Polisi memastikan, penanganan tersebut tidak berkaitan dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Kepolisian juga menegaskan, dugaan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan Cakra Adi Negara ditindaklanjuti berdasarkan laporan masyarakat, bukan karena adanya kepentingan pihak tertentu.

"Penanganan perkara ini tidak memiliki keterkaitan dengan pejabat pemerintah maupun tokoh publik sebagaimana isu yang berkembang di ruang publik terhadap sosok Pak Sufmi Dasco," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto kepada wartawan, Minggu (22/11).

Ia menjelaskan, perkara itu bermula dari laporan seorang warga berinisial DW. Laporan tersebut menjadi dasar bagi penyidik untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan unggahan di media sosial.

"Perkara tersebut ditangani berdasarkan laporan seorang warga berinisial DW," ucap Budi.

Adapun unggahan yang dipersoalkan dipublikasikan pada 21 Oktober 2026 melalui akun Facebook Cakra Adi Negara. Dalam unggahan tersebut, terdapat sejumlah narasi yang mengaitkan DW dengan persoalan dana yang berhubungan dengan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).

Merasa keberatan dengan unggahan tersebut, DW kemudian melaporkannya ke Polda Metro Jaya pada 3 November 2026. Laporan itu selanjutnya ditangani Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Metro Jaya melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, hingga pengumpulan alat bukti sesuai prosedur hukum.

Aparat kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap Cakra Adi Negara, pada Jumat (20/11) dini hari. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari kepentingan proses penyidikan atas laporan yang telah diterima kepolisian.

"Pada Jumat (20/11/2026) sekitar pukul 02.20 WIB, penyidik melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan untuk kepentingan proses penyidikan," jelasnya.

Dalam pemeriksaan awal, Cakra mengakui bahwa akun Facebook Cakra Adi Negara merupakan miliknya. Polisi juga mengamankan dua unit telepon seluler yang selanjutnya digunakan sebagai barang bukti untuk mendukung proses pembuktian perkara.

Meski sempat ditangkap, Cakra tidak menjalani penahanan. Setelah menyelesaikan pemeriksaan awal dan administrasi penyidikan, yang bersangkutan dipulangkan pada Sabtu (21/11) sekitar pukul 02.10 WIB dengan kewajiban menjalani wajib lapor secara berkala.

"Polda Metro Jaya menegaskan bahwa penanganan perkara tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat dan dilakukan berdasarkan fakta serta bukti yang diperoleh dalam …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Mohamad Sobary Usul Mahfud MD Jadi Pengganti Gibran

Oleh Redaksi · 22 Nov, 08.37 WIB



BANDA ACEH -Budayawan Mohamad Sobary mengusulkan Mahfud MD sebagai figur alternatif calon Wapres untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto di tengah polemik posisi RI 2 pengganti Gibran Rakabuming Raka. Pandangan tersebut disampaikan Sobary dalam perbincangan di program Madilog kanal YouTube Forum Keadilan TV yang dikutip Minggu 22 November 2026.

Sobary menilai, Presiden Prabowo belum tentu menjatuhkan pilihan kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, yang belakangan ramai diperbincangkan sebagai salah satu figur potensial Wapres.

"Saya mendapat informasi di bawah tanah belum terlalu terbuka itu presiden belum tentu condong kepada Bung Dasco," kata Sobary.

Di tengah berkembangnya berbagai spekulasi Politik, Sobary justru menyebut nama Mahfud MD sebagai alternatif yang patut dipertimbangkan untuk mendampingi Prabowo.

Menurutnya, Mahfud memiliki dua modal penting, yakni penguasaan ilmu pengetahuan, khususnya bidang hukum, serta pengalaman panjang dalam birokrasi dan pemerintahan.

Bukan sekadar mengusulkan nama, Sobary juga menyampaikan gagasan mengenai tugas yang semestinya diberikan apabila Mahfud dipercaya menjadi Wapres.

Ia mengusulkan agar Mahfud diberi mandat khusus untuk memperkuat penegakan hukum dan memberantas korupsi di Indonesia.

"Ini seorang yang sangat fokus bisa gue kasih tugas bikin negara ini anti korupsi, bikin negara ini bersih dari korupsi dan dia harus mati-matian, dia harus rela risiko," kata Sobary.

Bagi Sobary, agenda pemberantasan korupsi membutuhkan keseriusan dan keberanian menghadapi berbagai risiko. Karena itu, ia memandang Mahfud sebagai figur yang dapat diberi tanggung jawab khusus dalam agenda tersebut.

Sobary juga menepis anggapan bahwa kehadiran Mahfud sebagai Wapres berpotensi menjadi ancaman politik bagi Prabowo pada kontestasi Pilpres 2029. Ia menilai Mahfud memahami etika kekuasaan.

NASIONAL

Kombes Handoko Dipecat Tidak Hormat terkait Kasus Rekrutmen Bintara Rp 28 Miliar

Oleh Redaksi · 21 Nov, 11.49 WIB

BANDA ACEH - Kapolda Jambi Irjen Widodo membenarkan Kombes Handoko, mantan Karo SDM Polda Jambi, telah dipecat dari Polri. Pemecatan itu berkaitan dengan kasus penipuan seleksi Bintara Polri 2026 yang merugikan korban hingga Rp 28 miliar.

Widodo mengatakan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) Handoko diputuskan di tingkat Mabes Polri. Ia meminta detail keputusan tersebut ditanyakan langsung kepada Mabes Polri.

"Iya benar sudah dipecat, kan sudah tahu. Tetapi itu kan di Mabes (pemecatannya) untuk detailnya di sana," ujar Widodo kepada wartawan, Jumat (20/11/2026).

Kasus penipuan rekrutmen Bintara Polri di Jambi ini mencuat setelah Muhammad Daffa, ajudan Handoko, ditetapkan sebagai tersangka. Daffa bersama satu tersangka lainnya kini menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jambi.

Namun, penyidikan kasus ini tak berhenti pada dugaan penipuan. Polisi juga menelusuri aliran uang untuk mengungkap kemungkinan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Widodo mengatakan penyidik akan melacak ke mana saja uang hasil kejahatan tersebut mengalir. Jika ada uang yang berhasil disita, dana itu nantinya dapat dikembalikan kepada para korban melalui proses hukum.

"Kita TPPU-kan, kita follow the money. Apabila nanti, berapa nanti uang yang bisa disita, itu nanti kita kembalikan ke korban. Tetapi itu nanti harus melalui persidangan di pengadilan," kata dia.

Ia menegaskan penelusuran aliran dana tidak hanya mengandalkan keterangan para tersangka. Penyidik akan mendalami transaksi dan pihak-pihak yang diduga menerima aliran uang tersebut.

"Ya TPPU itu kita dalami, ke mana saja alirannya, tidak berdasarkan pengakuan tersangka saat ini saja," imbuhnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

LIFESTYLE

Setahun Ditinggal Suami Dinas ke Papua, Istri Anggota TNI Jalin Hubungan dengan Polisi

Oleh Redaksi · 21 Nov, 22.00 WIB

BANDA ACEH - Perselingkuhan anggota Polres Blitar Kota, Aiptu D, dengan perempuan berinisial T yang merupakan istri seorang anggota TNI, berujung pemecatan. Hubungan terlarang yang berlangsung selama satu tahun itu terbongkar setelah suami T, Kopda B, pulang dari penugasan di Papua.Perselingkuhan tersebut diduga terjadi selama Kopda B menjalankan tugas di Papua. Saat suaminya berada jauh dari rumah, T justru menjalin hubungan layaknya suami istri dengan Aiptu D.

Kasi Humas Polres Blitar Kota AKP Samsul Anwar membenarkan hubungan terlarang tersebut telah berlangsung selama suami T menjalani penugasan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Publik Menanti Progres Kasus Penyadapan Ilegal LSP

Oleh Redaksi · 22 Nov, 10.25 WIB



BANDA ACEH -Aparat penegak hukum didesak mengusut tuntas penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang diduga melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) bersama sejumlah jenderal polisi.

Benny menilai dugaan penyadapan terhadap kegiatan kepala negara bukan persoalan biasa. Ia bahkan menyebut tindakan tersebut sebagai dugaan makar yang harus diusut secara serius.

"Publik masih terus mengikuti dan menunggu progres penanganan Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan sejumlah jenderal polisi yang menyadap Istana dan kegiatan Presiden Prabowo," ujar Benny, Sabtu, 22 November 2026.

Politikus Partai Demokrat itu menyebut peristiwa tersebut sebagai kejadian serius karena menyangkut keamanan dan kewibawaan kepala negara.

"Ini pertama kali terjadi dalam sejarah republik, Kapolri dengan sejumlah jenderal polisi melakukan penyadapan kegiatan kepala negara. Ini jelas bukan penyadapan biasa. Ini tindakan makar," tegasnya.

Benny meminta seluruh pihak yang diduga terlibat dibongkar dan diproses melalui jalur hukum.

"Bongkar semua yang terlibat. Tangkap dan adili segera dalangnya," tandasnya.

NASIONAL

Geledah 5 Lokasi, Polri Sita Dokumen terkait Dugaan Makar Listyo Sigit Cs

Oleh Redaksi · 22 Nov, 08.48 WIB



BANDA ACEH - Bareskrim Polri menggeledah lima lokasi di Bogor dan Tangerang dalam penyidikan dugaan makar terkait penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menjerat mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan kawan-kawan. Dari rangkaian penggeledahan tersebut, polisi menemukan sejumlah dokumen dan spanduk serta mengidentifikasi empat posko yang diduga saling berkaitan.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro menjelaskan, penggeledahan dilakukan di lima lokasi berbeda. Empat lokasi berada di Bogor, sedangkan satu lokasi lainnya di Tangerang.

”Penggeledahan ini menjadi rangkaian daripada tindakan penyidikan terkait dengan (dugaan) tindak pidana makar,” kata Susatyo, Sabtu (21/11/2026).

Penggeledahan tersebut dilakukan setelah penyidik memeriksa puluhan saksi dan menemukan barang bukti elektronik. Susatyo menyebut salah satu rumah di Bogor yang digeledah diduga digunakan sebagai posko untuk mempersiapkan tindakan makar.

”Di sini adalah salah satu posko ya, yang menjadi dugaan permufakatan pada perbuatan permulaan perbuatan. Sehingga kami berharap konstruksi yang kami bangun terkait dengan tindak pidana makar ini menjadi sempurna,” ujarnya.

Dari rumah tersebut, polisi mengamankan sejumlah dokumen, spanduk, dan barang bukti lain yang diduga berkaitan dengan perkara. Susatyo menyebut temuan itu dinilai bersesuaian dengan salah satu pasal yang digunakan penyidik dalam mengusut dugaan makar.

”Jadi, sudah pernah kami sampaikan bahwa makar itu sesuai dengan Pasal 160 adalah niat untuk melakukan serangan. Baik itu serangan secara fisik maupun nonfisik, baik itu siber dan lain-lain,” ucap Susatyo.

Dia menambahkan, penyidik sejauh ini menemukan sekitar empat posko yang diduga saling berkaitan dengan perkara tersebut.

”Penggeledahan selain di daerah Jakarta, Bogor, juga Tangerang, kami menemukan berbagai aktivitas. Itu ada sekitar empat posko. Nanti lengkapnya akan kami sampaikan,” katanya.

Selain dokumen dan spanduk, Bareskrim juga menyita perangkat elektronik dari lokasi lain. Seluruh barang bukti tersebut dikumpulkan untuk melengkapi penyidikan.

”Untuk perangkat elektronik ada di tempat lain yang kami lakukan penyitaan, tetapi bukti-bukti dokumen kami temukan di tempat ini dan akan kami lengkapi pada saat nanti kami melaksanakan ekspos dengan pihak Kejaksaan,” jelasnya.

Diketahui, Bareskrim telah menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Mohamad Sobary: Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Oleh Redaksi · 22 Nov, 08.41 WIB



BANDA ACEH -Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi diduga kegelisahan luar biasa saat mengetahui putera sulungnya, Gibran Rakabuming Raka berencana mundur dari jabatan Wapres pada 12 November 2026 setelah menjabat sejak 20 Oktober 2024 (2 tahun 23 hari).

Hal itu dikatakan Budayawan Mohamad Sobary dalam program Madilog kanal YouTube Forum Keadilan TV yang dikutip Minggu 22 November 2026.

"Setidaknya 2-3 hari (jelang Gibran mundur) Jokowi prihatin, nggak tidur, berdoa. Makan nggak enak, ngerokok nggak enak, ngopi nggak enak. (Jokowi) cemas," kata Sobary.

Sementara Gibran, lanjut Sobary, tidak mengerti apa-apa. Sementara sejumlah orang-orang kemudian menyampaikan bisikan-bisikan tertentu.

"Dalam kondisi tidak tidur, Jokowi mengetahui DPR menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat. Itu artinya panah-panah ditujukan ke keluarga sana," kata Sobary.

Kondisi tersebut, kata Sobary, betul-betul dramatik dirasakan Jokowi dan keluarga di Solo.

"Tapi itu semua bagian dari karma alam semesta," kata Sobary.

Diketahui, pada Rabu, 11 November 2026, surat pengunduran diri Gibran diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik dokumen pendidikannya.

Sehari kemudian, surat yang sama diserahkan Gibran kepada MPR dan diterima Ketua MPR Ahmad Muzani di Senayan.

Sejak itu kursi wakil presiden kosong, dan konstitusi memberi MPR waktu paling lama enam puluh hari untuk mengisinya.

NASIONAL

Dicurigai Ada Penyusup di Istana dalam Dugaan Penyadapan Prabowo

Oleh Redaksi · 22 Nov, 08.30 WIB



BANDA ACEH -Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto tidak bisa dilihat sebagai persoalan teknis intelijen semata. Pengamat Politik dan militer Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting menilai, jika penyadapan benar terjadi, kemungkinan adanya penyusupan dari dalam lingkaran Istana.

Ginting mempertanyakan bagaimana pihak luar Istana bisa memperoleh akses terhadap komunikasi Presiden Prabowo, sementara sistem pengamanan kepala negara memiliki prosedur dan perangkat komunikasi khusus.

“Saya tanya kepada para mantan ajudan presiden, bagaimana sistem kerjanya? Kalian memegang berapa handphone? Mereka menjawab, masing-masing memegang beberapa handphone khusus,” kata Ginting, dikutip dari Podcast Forum Keadilan Madilog, Minggu 22 November 2026

Menurut Ginting, penggunaan sejumlah perangkat komunikasi khusus tersebut semestinya membuat akses terhadap komunikasi Presiden tidak mudah ditembus pihak luar.

Karena itu, jika dugaan penyadapan terhadap Presiden terbukti, Ginting menilai penyelidikan tidak boleh berhenti pada pihak yang diduga melakukan penyadapan. Orang-orang yang memiliki akses ke lingkungan Istana juga harus diperiksa.

“Kalau kemudian Presiden disadap, berarti kemungkinan ada penyusupan yang dilakukan dari dalam. Harus ada orang di dalam Istana yang juga diperiksa,” kata Ginting

SPORT

Hasil Sprint Race: Bezzecchi Menang di Portugal, Marc Marquez Gagal Kunci Gelar Juara Dunia

Oleh Redaksi · 21 Nov, 23.13 WIB

BANDA ACEH, PORTIMAO – Peluang Marc Marquez untuk memastikan gelar juara dunia MotoGP 2026 pada Sprint Race Portugal harus tertunda setelah pembalap Ducati tersebut terjatuh di tengah balapan yang berlangsung dalam kondisi hujan di Sirkuit Portimao, Sabtu.

Marquez sebenarnya hanya membutuhkan finis di posisi ketiga untuk mengunci gelar juara dunia kedelapannya. Ia sempat berada di posisi tersebut dalam balapan singkat yang berlangsung selama 12 putaran.

Namun, nasib berkata lain. Saat balapan menyisakan dua putaran, Marquez kehilangan kendali dan terjatuh di Tikungan 7 ketika hujan semakin deras. Insiden itu membuatnya gagal membawa pulang poin dan membuka kembali peluang para pesaingnya dalam perebutan gelar.

Di tengah insiden tersebut, Marco Bezzecchi tampil sebagai pembalap paling dominan. Start dari pole position, pembalap Aprilia itu langsung mengambil alih pimpinan balapan sejak tikungan pertama dan mampu mempertahankan keunggulannya hingga garis finis.

Raul Fernandez sempat memberikan perlawanan dengan merebut posisi kedua dari Marquez di Tikungan 3. Namun, kecepatan Fernandez menurun ketika hujan mulai mengguyur lintasan pada penghujung balapan.

Bezzecchi memanfaatkan situasi tersebut untuk memperlebar jarak dan akhirnya memenangi Sprint Race dengan keunggulan 8,378 detik atas Fernandez. Kemenangan ini menjadi kemenangan Sprint pertamanya musim ini.

Sementara itu, Alex Marquez berhasil mengamankan podium ketiga. Pembalap Gresini Ducati tersebut mengambil keuntungan setelah Fabio Di Giannantonio kehilangan posisi pada putaran ketiga, sebelum akhirnya mempertahankan tempatnya hingga balapan berakhir.

Jorge Martin menyelesaikan balapan di posisi kelima dengan motor Aprilia. Hasil tersebut membuat jaraknya dari Marc Marquez dalam klasemen perebutan gelar juara dunia menjadi 55 poin.

Pedro Acosta menempati posisi keempat, diikuti Martin di posisi kelima. Ai Ogura finis keenam, sedangkan Di Giannantonio berada di urutan ketujuh.

Fabio Quartararo mengakhiri balapan di posisi kedelapan setelah melakukan perbaikan posisi pada putaran-putaran terakhir. Sementara itu, Iker Lecuona melengkapi sembilan besar sekaligus menjadi pembalap terakhir yang memperoleh poin.

Hasil Sprint Race ini juga membawa kabar positif bagi Aprilia. Dua pembalap tim pabrikan mereka, Bezzecchi dan Martin, masing-masing finis di posisi pertama dan kelima. Hasil tersebut memastikan Aprilia meraih gelar juara dunia tim MotoGP 2026.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Yusril Nyatakan Siap Dampingi Prabowo Jadi Wapres Gantikan Gibran

Oleh Redaksi · 22 Nov, 08.58 WIB



BANDA ACEH -- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan kesiapannya apabila dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjadi wakil presiden menggantikan Gibran Rakabuming Raka.

Yusril menegaskan, secara pribadi dirinya tidak keberatan jika mendapat kepercayaan untuk menduduki posisi orang nomor dua di Indonesia tersebut.

Ia menilai pengalaman panjangnya di pemerintahan serta latar belakang pendidikan dan keilmuan yang berkaitan dengan urusan kenegaraan menjadi bekal untuk menjalankan tugas sebagai wakil presiden.

Pernyataan tersebut disampaikan Yusril pada Sabtu (21/11/2026).

"Secara pribadi siap, tapi ya terserah kepada Bapak Presiden kalau beliau memberikan kepercayaan," ujar Yusril.

Ia mengatakan, dirinya telah cukup lama berkecimpung dalam pemerintahan sehingga memahami berbagai persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara.

"Kalau dari segi menjalankan tugas-tugas saya kira sudah cukup lama juga kita ada di pemerintahan ini dan belajarnya juga ilmunya juga enggak jauh-jauh daripada ilmu mengurusi negara juga," katanya.

Berbekal Pengalaman dan Ilmu Tata Negara

Yusril menjelaskan, latar belakang keilmuannya memiliki keterkaitan erat dengan tugas-tugas kenegaraan.

Ia memiliki pengalaman dan pengetahuan di bidang hukum tata negara, ilmu Politik, hingga filsafat.

Menurut Yusril, ketiga bidang keilmuan tersebut memberikan pemahaman mengenai sistem pemerintahan, konstitusi, politik, serta bagaimana negara dijalankan.

Bekal tersebut, menurut dia, dapat menjadi modal apabila suatu saat mendapat amanah untuk menjalankan tugas sebagai wakil presiden.

Meski demikian, Yusril menegaskan bahwa keputusan mengenai siapa yang akan menduduki posisi wakil presiden sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataannya tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Yusril terbuka terhadap kemungkinan masuk dalam bursa calon wakil presiden apabila terjadi pergantian posisi yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka.

Peluang Menjadi Wapres Bergantung Keputusan Presiden

Pernyataan Yusril muncul di tengah pembicaraan mengenai sosok yang berpeluang mengisi posisi wakil presiden.

Nama-nama potensial pengganti Gibran menjadi perhatian setelah munculnya dinamika politik terkait posisi wakil presiden.

Namun, kesiapan pribadi Yusril tidak serta-merta menjadikannya sebagai calon resmi pengganti Gibran.

Penentuan calon wakil presiden tetap harus mengikuti mekanisme konstitusional dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, keputusan akhir mengenai sosok yang akan mendampingi Prabowo dalam pemerintahan masih menjadi kewenangan sesuai mekanisme ketatanegaraan.

Yusril sendiri memilih menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Presiden Prabowo.

NASIONAL

Mohamad Sobary: Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Oleh Redaksi · 22 Nov, 08.33 WIB



BANDA ACEH -Proses pidana terkait kasus surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka yang kini bergulir di kepolisian harus terus dilanjutkan.

Demikian penegasan Budayawan Mohamad Sobary dalam program Madilog kanal YouTube Forum Keadilan TV yang dikutip Minggu 22 November 2026.

"Itu perkara hukum, penipuan, harus dituntut. Jangan karena pernah jadi Wapres yang nggak mengerjakan apa-apa terus akan kebal hukum. Nggak (boleh)," kata Sobary.

Menurut Sobary, siapa pun yang melakukan tindak pidana harus diproses hukum. Tidak peduli mantan Presiden, mantan Wakil Presiden atau orang-orang di sekitarnya.

"(Proses hukum) tidak boleh pilih-pilih," kata Sobary.

Selama dua tahun, kata Sobary, Gibran telah diuntungkan dengan suket penyetaraan ijazah SMA.

"Bocah yang celingak-celinguk ini diuntungkan," kata Sobary.

Soal dalang suket Gibran, Sobary menyerahkannya pada proses pengadilan.

"Berhentinya Gibran tidak menghentikan proses hukum," kata Sobary.

Tim Advokasi Penegak Etika, Moral, dan Integritas Bangsa mendorong Bareskrim agar kasus dugaan pemalsuan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming, tetap jalan meski pekan lalu Gibran sudah menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.

Kasus dugaan tindak pidana seputar suket pendidikan Gibran untuk pendaftaran Pilpres 2024 resmi diajukan ke kepolisian pada 7 Oktober 2026. Tim advokasi pelapor juga menyerahkan salinan Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 sebagai tambahan bukti.

KOMUNITAS

Jamaah Pengajian Al-Ashri Ulee Kareng Berbagi, Salurkan Sedekah untuk Santri Dayah Wakaf Barbate

Oleh Hamdani · 21 Nov, 20.16 WIB

ACEH BESAR – Kepedulian terhadap sesama tidak selalu diwujudkan melalui hal-hal besar. Ketulusan berbagi dan perhatian terhadap kebutuhan orang lain juga menjadi bentuk nyata pengamalan nilai-nilai keimanan. Semangat itulah yang ditunjukkan ibu-ibu Pengajian Al-Ashri, Ulee Kareng, Banda Aceh, melalui penyaluran sedekah untuk santri Dayah Wakaf Barbate, Jumat (20/11/2026).

Kegiatan berbagi tersebut menjadi wujud kepedulian jamaah terhadap pemenuhan kebutuhan pangan para santri. Sedekah diantarkan langsung oleh empat perwakilan jamaah, yakni Safwaini, Masniar, Deti, dan Cut Rohana. Ini merupakan bagian dari dukungan terhadap pelayanan Tha'am atau penyediaan makanan bagi santri Dayah Wakaf Barbate.

Sedekah yang disalurkan terdiri atas 95 bungkus nasi goreng ayam, tiga dus susu kotak, dan air timun segar. Selain makanan siap santap, jamaah juga menyerahkan berbagai kebutuhan pokok dan bahan pangan untuk menunjang operasional dapur dayah, meliputi delapan lempeng telur, 10 sak beras, 10 kilogram gula, 20 kilogram minyak goreng, tiga kilogram garam, cabai satu kilogram, bawang merah dua kilogram, bawang putih dua kilogram, tomat tiga kilogram, serta ikan teri dua kilogram.

Turut diserahkan kecap, permen Kopiko, dan empat kemasan cairan pencuci piring sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan sehari-hari di dapur dayah.

Ketua Umum Yayasan Wakaf Barbate Islamic City (YWBIC), Prof. Dr. Sofyan A. Gani, MA, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jamaah Pengajian Al-Ashri atas kepedulian yang diberikan.

Menurutnya, perhatian tersebut tidak sekadar membantu memenuhi kebutuhan konsumsi santri, tetapi juga menghadirkan nilai persaudaraan, kepedulian sosial, dan semangat berbagi yang menjadi bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Sementara itu, Koordinator ibu-ibu Pengajian Al-Ashri, menyampaikan bahwa kegiatan berbagi tersebut merupakan ikhtiar jamaah untuk mengamalkan ajaran Al-Qur'an, khususnya anjuran bersedekah dan membantu sesama. Ia mengaitkan kegiatan tersebut dengan Surah Al-Baqarah ayat 245 tentang qardhan hasanan, yakni memberikan pinjaman yang baik kepada Allah SWT, yang dijanjikan balasan berlipat ganda.

Menurutnya, ayat tersebut menjadi pengingat bahwa harta dan rezeki yang dibagikan dengan ikhlas di jalan Allah SWT tidak akan sia-sia. Sebaliknya, Allah menjanjikan balasan yang berlipat ganda bagi hamba-Nya yang gemar berbuat kebaikan.

Yurnalis juga mengungkapkan bahwa kepedulian terhadap sesama, terutama dalam memberi makan mereka yang membutuhkan, menjadi salah satu pesan penting yang ingin …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Ketua SMSI Aceh Besar Hadiri Mubes IX PB-IPAR

Oleh Redaksi · 21 Nov, 19.18 WIB



BANDA ACEH, ACEH BESAR – Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Aceh Besar, Zulfikar, S.Pd., menghadiri Musyawarah Besar (Mubes) IX Pengurus Besar Pemuda Aceh Besar (PB-IPAR) Tahun 2026 di Hotel Permata Hati, Kecamatan Ingin Jaya, Sabtu (21/11/2026).

Mubes mengusung tema "Regenerasi Pimpinan, Wujud Pemuda Aceh Besar yang Kreatif, Inovatif, dan Visioner."

Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris (Syeh Muharram), anggota DPD RI Tgk. Ahmada, Ketua MPU Aceh, Ketua MAA Aceh Besar H. Anwar Ahmad, S.E., A.K., anggota DPRK Aceh Besar Maulana Akbar, tokoh masyarakat, serta perwakilan OKP se-Aceh Besar.

Di sela kegiatan, Zulfikar menyampaikan apresiasi kepada Fata Muhammad, S.Pd., M.M., yang telah memimpin PB-IPAR selama dua periode.

Ia berharap kepemimpinan berikutnya mampu melanjutkan program positif, memperkuat persatuan, serta melahirkan gagasan baru bagi kemajuan pemuda dan daerah.

Zulfikar juga menegaskan kesiapan SMSI Aceh Besar untuk bersinergi dengan PB-IPAR melalui berbagai program, khususnya pelatihan jurnalistik, literasi media, dan edukasi digital bagi generasi muda.

"SMSI Aceh Besar siap berkolaborasi dengan PB-IPAR, baik melalui pelatihan jurnalistik maupun kegiatan yang mendukung pembangunan Aceh Besar.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

5 BERITA

ACEH

ANTARA Gelar Pameran Foto “Bangkit Sumatera” di Museum Tsunami Aceh

Oleh Redaksi · 22 Nov, 15.23 WIB



BANDA ACEH – Perum LKBN ANTARA menggelar pameran foto jurnalistik bertajuk “Bangkit Sumatera” di Museum Tsunami Aceh, pada 22–27 November 2026 sebagai upaya menghadirkan edukasi kebencanaan sekaligus merekam semangat masyarakat dalam bangkit dari bencana.

Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Perum LKBN ANTARA Virgandhi Prayudantoro mengatakan pameran tersebut menghadirkan kisah ketangguhan masyarakat, solidaritas kemanusiaan, serta perjuangan warga dalam menata kembali kehidupan pascabencana melalui karya foto jurnalistik.

“Di balik setiap musibah dan tantangan yang melanda saudara-saudara kita di Sumatera, selalu ada cerita kepahlawanan warga, kerja keras para relawan, dan semangat pantang menyerah untuk menata kembali kehidupan di masa depan,” kata Virgandhi.

Pameran tersebut menyuguhkan 88 foto tunggal dan dua foto cerita jurnalistik karya pewarta foto ANTARA yang merekam berbagai peristiwa bencana, kondisi masyarakat terdampak, upaya penanganan, solidaritas kemanusiaan, hingga proses pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Virgandhi mengatakan Museum Tsunami Aceh dipilih sebagai lokasi pameran karena memiliki nilai historis dan menjadi ruang refleksi sekaligus edukasi kebencanaan, terutama bagi masyarakat Aceh yang memiliki pengalaman panjang menghadapi bencana.

Melalui karya-karya foto yang ditampilkan, masyarakat diajak menelusuri kembali jejak peristiwa, ketangguhan warga, solidaritas kemanusiaan, serta berbagai pelajaran penting mengenai kesiapsiagaan menghadapi bencana.

“Setiap karya foto menyimpan cerita yang melampaui kata-kata. Ia merekam duka yang menguatkan, harapan yang tumbuh perlahan, dan semangat bangkit yang patut terus dijaga, khususnya bagi generasi muda agar sejarah dan pesan kemanusiaan ini tidak pernah pudar,” ujarnya.

Ia mengatakan foto jurnalistik tidak sekadar merekam peristiwa, tetapi juga menjadi saksi sejarah, rekaman empati, sekaligus pengingat atas pengalaman masyarakat dalam menghadapi bencana.

Pameran tersebut juga diharapkan menjadi sarana edukasi publik untuk meningkatkan literasi kebencanaan, memperkuat kesadaran masyarakat mengenai kesiapsiagaan, serta membuka ruang diskusi dan evaluasi terhadap penanganan bencana yang efektif dan efisien.

Pameran “Bangkit Sumatera” merupakan bagian dari penugasan Public Service Obligation (PSO) Bidang Pers dari Kementerian Komunikasi dan Digital kepada Perum LKBN ANTARA. Kegiatan tersebut menjadi pameran kelima dari enam rangkaian pameran foto jurnalistik yang diselenggarakan ANTARA sepanjang 2026.

Virgandhi mengajak masyarakat Banda Aceh dan sekitarnya, termasuk pelajar, mahasiswa, serta penggemar fotografi, untuk mengunjungi pameran foto “Bangkit Sumatera” di Museum Tsunami Aceh pada 22–27 November 2026.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Pangdam IM Jalin Silaturahmi dengan Bupati Pidie Jaya, Perkuat Sinergitas TNI dan Pemda

Oleh Redaksi · 22 Nov, 15.17 WIB



PIDIE JAYA – Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Pangdam IM) Brigadir Jenderal TNI Mahesa Fitriadi melaksanakan kegiatan silaturahmi dengan Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi, di Pendopo Bupati Pidie Jaya, Kota Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Minggu (22/11/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan silaturahmi, memperkuat komunikasi, serta membangun koordinasi dan sinergitas antara TNI, khususnya Kodam Iskandar Muda, dengan pemerintah daerah (pemda) dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pembangunan di wilayah Pidie Jaya.

Kedatangan Pangdam IM disambut hangat oleh Bupati Pidie Jaya, Danrem 011/Lilawangsa, DPRK Pidie Jaya, Kajati Pidie Jaya, Dandim 0102/Pidie, Kapolres Pidie Jaya, Dandeninteldam IM, Danyonif TP 901/GS, Pabandya Lidpam Sinteldam IM, serta sejumlah pejabat dan unsur perangkat Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.

Dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan, pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kelembagaan sekaligus membangun komunikasi yang harmonis antara jajaran TNI dan pemda. Melalui silaturahmi ini, berbagai hal terkait kondisi wilayah, stabilitas keamanan, serta dukungan terhadap program pembangunan daerah dapat dikomunikasikan dan dikoordinasikan secara lebih baik.

Pangdam IM menegaskan bahwa sinergi dan kerja sama antara TNI dengan pemda merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan situasi wilayah yang aman, kondusif, serta mendukung kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi dan koordinasi yang berkesinambungan perlu terus dipelihara guna menghadapi berbagai tantangan dan dinamika di wilayah.

Dengan terjalinnya silaturahmi tersebut, diharapkan hubungan baik antara Kodam Iskandar Muda dan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya semakin solid, sehingga dapat memperkuat kolaborasi dalam menjaga stabilitas keamanan, mendukung percepatan pembangunan, serta memberikan kontribusi nyata bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan berlangsung dalam suasana hangat, penuh keakraban, dan mencerminkan komitmen bersama untuk terus menjaga hubungan harmonis antara TNI dan pemerintah daerah sebagai mitra strategis dalam membangun daerah.[]

ACEH

BERGEMA di Museum Aceh, Ibu Profesional Ajak Keluarga Bangun Kedekatan dan Kebersamaan

Oleh Hamdani · 21 Nov, 21.47 WIB

BANDA ACEH – Sebanyak 30 keluarga mengikuti kegiatan BERGEMA (Berbagi, Bergerak, Bersama) yang diselenggarakan Ibu Profesional Aceh di Museum Aceh, Banda Aceh, Sabtu (21/11/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari gerakan serentak Ibu Profesional di 50 kabupaten/kota di Indonesia untuk memperkuat hubungan dan kebersamaan dalam keluarga.

Kegiatan tersebut menghadirkan Founder Ibu Profesional, Septi Peni Wulandani, bersama inisiator Ibu Profesional, Dodik Mariyanto. Keduanya turut membersamai peserta dalam berbagai aktivitas edukatif dan interaktif yang melibatkan ayah, ibu, dan anak.

Salah satu agenda yang menarik perhatian peserta adalah sesi Aku dan Bapakku. Dalam kegiatan ini, para ayah dan anak diajak membangun kedekatan melalui permainan tradisional dan interaksi menyenangkan. Aktivitas tersebut dirancang untuk memperkuat komunikasi sekaligus menghadirkan waktu berkualitas antara ayah dan anak.

Di saat yang sama, para ibu mengikuti Mom's Mini Workshop Pandu 45 bersama Septi Peni Wulandani dan Dodik Mariyanto. Workshop tersebut mengangkat tema pengenalan bakat, dengan tujuan membantu para ibu memahami potensi diri serta mengenali keunikan bakat setiap anggota keluarga.

Rangkaian kegiatan juga diisi dengan penyerahan beasiswa dari The Human Safety Net sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan potensi dan kesempatan belajar. Sementara itu, kehadiran Homee si Gajah dan Beebo si Lebah sebagai ikon kegiatan turut menambah keceriaan anak-anak.

Suasana semakin semarak saat seluruh peserta mengikuti sesi dance bersama yang menghadirkan interaksi hangat antarkeluarga dan lintas generasi.

Sekretaris Regional Ibu Profesional Aceh, Mirzayanti, mengatakan BERGEMA bukan sekadar kegiatan berkumpul, melainkan momentum untuk mengingatkan kembali pentingnya keluarga sebagai lingkungan pertama dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan.

“Melalui BERGEMA, kami ingin menghadirkan ruang bagi keluarga untuk saling mendekat, berbagi kebahagiaan, dan …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Musprov PERSINAS ASAD Aceh: Tarno Terpilih Aklamasi, Siap Bersungguh-Sungguh Mengabdi

Oleh Redaksi · 21 Nov, 12.58 WIB

BANDA ACEH – Musyawarah Provinsi (Musprov) Perguruan Pencak Silat Nasional (PERSINAS) ASAD Aceh sukses digelar di Aula Satpol PP Aceh, Sabtu (21/11/2026).

Dalam forum tertinggi organisasi di tingkat provinsi tersebut, Tarno terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Pengprov PERSINAS ASAD Aceh.

Musprov ini dibuka secara resmi oleh Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PERSINAS ASAD, Marsma TNI (Purn) Sukur, M.Si. (Han).

Dalam sambutan pembukaannya, Ketua Umum PB PERSINAS ASAD menyampaikan pesan singkat mengenai pentingnya penguatan organisasi dan pembinaan berkelanjutan.

”Musprov ini harus menjadi langkah strategis memperkuat soliditas organisasi, membina prestasi atlet, dan menjaga karakter luhur pesilat agar terus memberi manfaat bagi daerah,” ujarnya.

Dukungan terhadap pelaksanaan Musprov dan kiprah PERSINAS ASAD di Aceh juga disampaikan oleh Sekretaris Pengprov Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Aceh Maszuwar ZM.

Dalam sambutannya, pihak IPSI Aceh mengapresiasi peran PERSINAS ASAD dalam pembinaan pencak silat serta mendorong penguatan sinergi antarperguruan dan pemangku kepentingan olahraga demi kemajuan prestasi pencak silat Aceh.

Pada agenda pemilihan ketua, seluruh peserta Musprov bersepakat menetapkan Tarno secara aklamasi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Wagub Aceh Hadiri Pelantikan Pengurus FOSKADJA Periode 2026–2029

Oleh Redaksi · 22 Nov, 14.56 WIB



BANDA ACEH – Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, Fadhlullah menghadiri pelantikan pengurus Forum Silaturrahmi dan Komunikasi Alumni Dayah Jeumala Amal (FOSKADJA) periode 2026–2029 yang dirangkai dengan Khanduri Maulid Nabi Muhammad SAW, di Anjong Mon Mata, Minggu (22/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Fadhlullah menyampaikan sambutan yang mengapresiasi terselenggaranya kegiatan sekaligus mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus FOSKADJA yang baru dilantik. Ia berharap kepengurusan periode 2026–2029 dapat menjalankan amanah dengan baik serta membawa organisasi menjadi lebih solid dan memberikan manfaat yang lebih luas.

"Atas nama Pemerintah Aceh, kami menyampaikan selamat dan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Kami juga mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus FOSKADJA yang baru dilantik," ujar Fadhlullah.

Menurutnya, FOSKADJA memiliki peran penting bukan hanya sebagai wadah mempererat hubungan ant alumni, tetapi juga sebagai ruang untuk menyatukan gagasan, pengalaman, dan potensi para alumni dalam memberikan kontribusi bagi masyarakat.

Ia juga berharap para alumni Dayah Jeumala Amal dapat terus membawa nilai-nilai keislaman, akhlak mulia, dan kemandirian yang diperoleh selama menempuh pendidikan untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Fadhlullah turut mendorong kepengurusan baru agar memperkuat konsolidasi organisasi, membangun komunikasi yang erat antargenerasi alumni, serta menghadirkan berbagai kegiatan yang bermanfaat. Para alumni diharapkan dapat mengambil peran dalam mendukung pembangunan Aceh, khususnya di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan keagamaan.

"Para alumni hendaknya dapat menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan masyarakat, sekaligus turut mendukung pembangunan Aceh melalui bidang pendidikan, sosial, ekonomi, keagamaan, dan bidang lainnya," katanya.

Ia juga menyampaikan bahwa momentum Khanduri Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi pengingat bagi seluruh hadirin untuk meneladani akhlak Rasulullah, terutama dalam hal kejujuran, amanah, persaudaraan, kepedulian, dan keteladanan.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Tgk. H. M. Daud Hasbi, M.Ag (Abi Daud Hasbi), Direktur Dayah Jeumala Amal Drs. Tgk. Hamdani AR, Ketua Umum beserta jajaran pengurus FOSKADJA, para alumni Dayah Jeumala Amal, serta sejumlah tamu undangan dan masyarakat yang mengikuti rangkaian kegiatan.

Menutup sambutannya, Fadhlullah berharap FOSKADJA terus berkembang menjadi organisasi yang solid dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Dayah Jeumala Amal, masyarakat, serta Aceh secara keseluruhan.[]

ACEH

Perkuat Pemberantasan Narkoba, TNI AL Musnahkan 20,07 Kilogram Sabu

Oleh Van · 22 Nov, 15.01 WIB



Personel TNI AL menunjukkan paket barang bukti hasil penyitaan di sebuah pelabuhan. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum dan keamanan laut.

ACEH TAMIANG – Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 20,07 kilogram hasil pengungkapan Quick Response Team (QRT) Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Lhokseumawe di wilayah pesisir Kabupaten Aceh Tamiang.

Pemusnahan tersebut merupakan tindak lanjut dari keberhasilan personel QRT Lanal Lhokseumawe dalam menggagalkan dugaan penyelundupan narkotika melalui jalur pesisir. Barang bukti yang diamankan terdiri atas 20 paket sabu yang dikemas menggunakan bungkus teh.

Pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di kawasan pesisir Aceh Tamiang. Menindaklanjuti laporan tersebut, personel QRT Lanal Lhokseumawe melakukan penyisiran dan pemeriksaan di lokasi yang diinformasikan.

Dalam operasi tersebut, petugas menemukan sejumlah paket berisi narkotika jenis sabu. Namun, pihak yang diduga membawa atau menguasai barang tersebut berhasil melarikan diri sehingga petugas melakukan langkah penelusuran lebih lanjut.

Setelah melalui proses penanganan sesuai ketentuan, barang bukti narkotika dengan berat keseluruhan 20,07 kilogram tersebut kemudian dimusnahkan oleh TNI AL di Mako Kodaeral I, Belawan, pada Jumat (20/11/2026).

Keberhasilan pengungkapan dan pemusnahan barang bukti tersebut menjadi bagian dari upaya TNI AL dalam memperkuat pengawasan wilayah perairan serta mencegah kawasan pesisir dimanfaatkan sebagai jalur peredaran gelap narkotika.

Langkah ini sekaligus menunjukkan pentingnya sinergi aparat keamanan dan masyarakat dalam memberikan informasi serta membantu upaya pemberantasan peredaran narkoba di wilayah Indonesia.(*)

HIBURAN

Jadi Anggota DPR, Kuliah S1 Mulan Jameela Tercatat Cuma 2 Tahun; Emang Ada?

Oleh Redaksi · 21 Nov, 17.36 WIB

BANDA ACEH -- Riwayat pendidikan anggota DPR RI kembali menjadi perbincangan publik. Kali ini, nama penyanyi sekaligus politikus Mulan Jameela ikut terseret setelah durasi pendidikan S1-nya dipertanyakan psikolog Lita Gading.Sorotan tersebut muncul di tengah desakan agar latar belakang pendidikan para wakil rakyat dibuka secara transparan. Mulan menjadi salah satu figur yang diperbincangkan karena tercatat menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Kebangsaan pada 2021.

Berdasarkan data riwayat pendidikan yang tercantum di laman Fraksi Gerindra, Mulan menempuh pendidikan di Universitas Kebangsaan pada 2019–2021 dengan jurusan Sastra Inggris.

Rentang waktu dua tahun itulah yang kemudian mengundang pertanyaan dari Lita Gading. Melalui unggahan di media sosial, ia mempertanyakan apakah pendidikan S1 bisa diselesaikan dalam waktu sesingkat itu.

"Dia lagi, tempo hari saya pernah bahas orang ini, dia katanya kuliah, dia posting pas lagi di wisuda, ternyata S1-nya cuma 2 tahun, emang ada sekolah S1 2 tahun? Secepet-cepetnya itu 3 tahun," ujar Lita.

Psikolog tersebut juga menyinggung posisi Mulan sebagai anggota DPR RI. Ia mempertanyakan kesesuaian latar belakang pendidikan dan pengalaman Mulan dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya di parlemen.

"Kamu itu SMA ditempatkan di tempat yang kamu gak paham apa-apa, terus kamu kuliah supaya kamu terlihat berpendidikan," sentil Lita.

Tak berhenti pada persoalan gelar sarjana Mulan, Lita turut menyinggung rencana istri Ahmad Dhani tersebut untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2.

Ia mempersilakan apabila Mulan memang ingin meneruskan kuliah, tetapi meminta agar proses pendidikannya dilakukan melalui jalur yang benar.

"Si muljem itu udah kuliah katanya sekarang mau lanjut S2 silakan kalau benar jalurnya, tapi sekarang terbukti kan gais, cepat atau lambat akan terbongkar," lanjutnya.

Lita juga mempertanyakan pihak-pihak yang hadir dalam momen wisuda Mulan dan meminta agar persoalan riwayat pendidikan tidak hanya berhenti pada satu nama.

Pernyataan tersebut membuat perdebatan mengenai latar belakang pendidikan anggota DPR kembali mencuat. Menurut Lita, transparansi riwayat akademis para wakil rakyat perlu menjadi perhatian.

Di sisi lain, data resmi Majelis Permusyawaratan Rakyat mencantumkan Mulan Jameela, S.S.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

LIFESTYLE

Istri Pura-pura Kesurupan Setiap Diajakin Suami, Ternyata Belum Move On dari Mantan

Oleh Redaksi · 21 Nov, 17.22 WIB

BANDA ACEH - Ilustrasi uang tunai (arsip 2025). Istri belum move on dari mantan pacar, tinggalkan suami yang baru dinikahinya. Uang panai Rp100 juta pun diminta dikembalikan. BANJARMASINPOST.CO.ID - Istri belum move on dari mantan pacar, tinggalkan suami yang baru dinikahinya. Uang panai Rp100 juta pun diminta dikembalikan.

Peristiwa viral di media sosial itu menimpa pengantin pria di Bantaeng, Sulawesi Selatan.

Pengantin itu bernama Ismail bin Sanji. Dia ditinggal istrinya karena belum move on dari mantan pacar.

Usai memberikan uang panai Rp100 juta dan menikah 20 hari, Ismail bin Sanji justru ditinggal istrinya lantaran masih sayang kepada mantan kekasihnya.

Tak pelak, pengantin pria yang viral karena ditinggal istrinya bernama Astrid lantaran …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

HIBURAN

Erin Mantan Istri Andre Taulany jadi Tersangka, Dituding Pukul ART Pakai Sapu

Oleh Redaksi · 21 Nov, 17.30 WIB



BANDA ACEH - Erin mantan istri Andre Taulany jadi tersangka, dituding pukul ART pakai gagang sapu hingga tendang kepala - Hops IDHops.ID - Kasus dugaan penganiayaan yang menyeret Rien Wartia Trigina alias Erin, mantan istri Andre Taulany, memasuki babak baru.

Erin disebut telah ditetapkan sebagai tersangka atas laporan mantan asisten rumah tangganya, Herawati. Informasi tersebut disampaikan mantan kuasa hukum Erin dari Misyal & Partners dalam konferensi pers pada Jumat, 20 November 2026.

Jose Azhan Asmansyah mengatakan Erin sudah menerima surat panggilan sebagai tersangka sejak 30 September 2026. Menurutnya, pemberitahuan tersebut juga telah dikirim penyidik ke kediaman Erin dan ditembuskan kepada kuasa hukum.

"Saudari Erin itu sebenarnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan panggilan surat tersangkanya pada tanggal 30 September," kata Jose.

Status tersangka ini berkaitan dengan laporan Herawati di Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya, polisi menerima laporan dugaan kekerasan fisik yang terjadi pada 28 April 2026.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Kinerja Penegakan Hukum Polres Aceh Barat Masuk Dua Besar Polda Aceh

Oleh Biro Meulaboh · 22 Nov, 12.14 WIB



Polres Aceh Barat meraih peringkat kedua se-Polda Aceh dalam penyelesaian perkara,FOTO/ist

BANDA ACEH – Polres Aceh Barat menempati peringkat kedua dalam persentase penyelesaian perkara di jajaran Polda Aceh untuk periode 1 Januari hingga 15 November 2026. Berdasarkan data aplikasi Daily Operation Reporting System (DORS), capaian Polres Aceh Barat mencapai 135,70 persen.

Posisi pertama ditempati Polres Lhokseumawe dengan capaian 137,86 persen, disusul Polres Aceh Barat di posisi kedua dan Polres Aceh Selatan di peringkat ketiga dengan persentase 128,80 persen.

Capaian tersebut disampaikan dalam kegiatan Gelar Operasional (GO) Polda Aceh yang berlangsung pada 19–20 November 2026. Kegiatan ini menjadi forum evaluasi kinerja kepolisian, termasuk penanganan dan penyelesaian perkara di seluruh wilayah hukum Polda Aceh.

Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto, S.H., S.I.K., mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja keras, dedikasi, dan sinergi seluruh personel, khususnya jajaran fungsi reserse.

Ia mengapresiasi personel yang telah berkomitmen menangani laporan masyarakat dan menyelesaikan perkara sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, capaian itu bukan sekadar angka evaluasi organisasi, melainkan bagian dari tanggung jawab Polri dalam memberikan pelayanan dan kepastian hukum kepada masyarakat.

Meski demikian, Kapolres mengingatkan jajarannya agar tidak berpuas diri. Ia meminta seluruh personel terus meningkatkan kualitas penyelidikan dan penyidikan, mempercepat penanganan perkara tanpa mengabaikan prosedur, serta memastikan setiap laporan masyarakat ditindaklanjuti secara optimal.

Agus menegaskan, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari persentase penyelesaian perkara, tetapi juga dari kualitas penanganan, transparansi proses, kepastian informasi, dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Upaya tersebut sejalan dengan program Quick Wins Kapolri yang menekankan percepatan transformasi Polri, termasuk penguatan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel. Salah satu aspek yang menjadi perhatian ialah keterbukaan informasi perkembangan perkara melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).

Polres Aceh Barat juga berkomitmen memperkuat pelaksanaan program Polres Kuat dan Polsek Tangguh guna meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian hingga tingkat kewilayahan.

Melalui evaluasi berkelanjutan, pengawasan internal, serta peningkatan kemampuan personel, Polres Aceh Barat berharap dapat mempertahankan sekaligus meningkatkan kinerja penanganan perkara dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.[]

Editor : Biro Meulaboh.

LINGKUNGAN

Banjir Kembali Hantam Aceh Tamiang, Ribuan Warga Mengungsi dan Akses Desa Terputus

Oleh Van · 21 Nov, 16.20 WIB



Puing-puing berserakan di desa yang luluh lantah akibat bencana alam.

KUALA SIMPANG — Aceh Tamiang kembali menghadapi banjir pada November 2026 ketika proses pemulihan dari bencana tahun sebelumnya belum sepenuhnya selesai. Banjir kali ini berdampak pada lebih dari 18.000 jiwa dan menyebabkan ribuan warga mengungsi.

Akun Threads @puturmdn mengunggah kondisi sejumlah desa di Tamiang pada Sabtu, 21 November 2026. Dalam unggahannya, akun tersebut memperlihatkan kondisi wilayah terdampak dan menyebut situasi kali ini lebih parah.

"Dampak dari bencana di 2025 masih belum pulih lalu di 2026 ini kembali terjadi dan kali ini lebih parah," tulis @puturmdn.

18.158 Warga Terdampak Banjir Aceh Tamiang

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 15 November 2026 mencatat 5.785 keluarga atau 18.158 jiwa terdampak banjir di Aceh Tamiang. Sebanyak 1.423 keluarga atau 5.088 jiwa di antaranya mengungsi.

Banjir tersebut melanda delapan kecamatan, yakni Tenggulun, Bandar Pusaka, Kejuruan Muda, Kota Kuala Simpang, Karang Baru, Rantau, Bendahara, dan Seruway. Sebanyak 885 rumah terendam dan 158 hektare sawah terdampak.

BNPB juga mencatat enam titik atau ruas jalan di Kecamatan Tenggulun terputus maupun tidak dapat dilalui. Kondisi ini menghambat akses masyarakat di sejumlah wilayah terdampak.

Dalam unggahan yang sama, @puturmdn menyebut akses jembatan di beberapa desa mengalami kerusakan hingga terputus. Informasi tersebut merupakan keterangan dalam unggahan dan belum terkonfirmasi secara terpisah melalui data resmi yang ditemukan.

Banjir Masih Menggenangi Sejumlah Desa

Perkembangan kondisi pada Jumat, 20 November 2026 menunjukkan banjir belum sepenuhnya surut. BPBD Aceh Tamiang melaporkan delapan desa di Kecamatan Bendahara masih tergenang.

Plt Kepala Pelaksana BPBD Aceh Tamiang Iman Suhery menjelaskan curah hujan yang masih tinggi dan kondisi pasang air laut membuat genangan bertahan. Data BPBD yang dilaporkan pada periode tersebut mencatat 12.568 jiwa terdampak di 62 kampung pada delapan kecamatan.

Sebelumnya, banjir mulai melanda Aceh Tamiang pada Kamis, 12 November 2026 setelah hujan deras …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

LIFESTYLE

Ahli Tarot Ungkap Dalang Makar terhadap Prabowo adalah 'Mantan Raja' yang Manipulatif dan Berhati Busuk!

Oleh Redaksi · 21 Nov, 15.31 WIB



Seseorang sedang menjelaskan makna kartu tarot King of Cups dalam posisi terbalik.

BANDA ACEH - Seorang pembaca tarot bernama Hartono Luen mengklaim ada upaya pengkhianatan dan makar yang gagal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Klaim tersebut disampaikan dalam sebuah video TikTok yang beredar pada 8 November 2026.Dalam video itu, Hartono tampil membacakan enam kartu tarot untuk menjawab pertanyaan tentang siapa dalang di balik dugaan upaya mengkudeta Presiden Prabowo.

Hartono menyebut kartu pertama yang muncul adalah Seven of Cups atau Tujuh Cawan, yang ia tafsirkan sebagai kartu ilusi.

Menurutnya, kartu tersebut menggambarkan adanya keinginan untuk merebut tahta, kekayaan, dan kemenangan dengan niat buruk. Karena kartu itu muncul di awal pembacaan, ia menyimpulkan upaya tersebut akan gagal.

"Kalau niat buruk di awal, ya gagal. Kudetanya akan gagal," kata Hartono dalam video itu.

Ia juga menafsirkan kartu tersebut sebagai tanda bahwa persiapan pihak yang dituduhkan itu tidak matang dan terlalu ambisius.

Pada pembacaan berikutnya, Hartono mengklaim kelompok yang dituduh telah menyiapkan intelijen untuk memata-matai Presiden Prabowo.

Namun, ia menyebut upaya itu juga akan berbalik karena Presiden Prabowo disebut memiliki jaringan intelijen sendiri yang juga melakukan pengawasan.

"Tapi mereka lupa kalau pedang adalah memiliki dua mata pedang. Kalian memata-matai Pak Prabowo, Pak Prabowo juga punya intelijen yang buat memata-matai kalian," ujarnya.

Hartono juga menafsirkan adanya kartu Five of Swords atau Lima Pedang sebagai simbol pengkhianatan yang sudah terjadi, tetapi dilakukan secara ceroboh karena meninggalkan dua pedang, sehingga masih bisa terlacak.

Saat ditanya siapa dalangnya, Hartono mengeluarkan kartu King of Cups dalam posisi terbalik.

Ia tidak menyebut nama siapa pun. Ia hanya menggambarkan sosok tersebut sebagai seorang "mantan petinggi" dan "mantan raja" yang disebutnya sangat manipulatif.

"Artinya orangnya, gua enggak bakal sebut nama ya. Orangnya adalah mantan petinggi," kata Hartono.

Menurut tafsirnya, King of Cups terbalik melambangkan sosok yang pandai memainkan perasaan masyarakat, pandai berakting sebagai pihak yang terzalimi, tetapi di balik sikap yang terlihat bijaksana dan tenang, memiliki niat buruk.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

LIFESTYLE

Viral Merica Bubuk Ladaku Ditahan Taiwan, Ini Temuan Residu Pestisidanya

Oleh Redaksi · 21 Nov, 16.52 WIB

BANDA ACEH - Produk merica bubuk merek Ladaku asal Indonesia ditahan otoritas pangan Taiwan setelah ditemukan mengandung residu dua jenis pestisida yang melebihi batas maksimum. Produk yang diproduksi PT Motasa Indonesia tersebut tercatat memiliki berat total 24 kilogram.Temuan itu diumumkan oleh Taiwan Food and Drug Administration (TFDA) pada 17 November 2026. Berdasarkan hasil pemeriksaan, produk tersebut mengandung residu pestisida tiametoksam sebesar 0,07 ppm dan fipronil sebesar 0,003 ppm.

Kadar tersebut melampaui batas maksimum residu pestisida yang ditetapkan Taiwan. Untuk tiametoksam, batas yang diperbolehkan sebesar 0,05 ppm, sedangkan fipronil sebesar 0,002 ppm.

Dengan hasil tersebut, kedua residu pestisida dinyatakan tidak memenuhi ketentuan keamanan pangan Taiwan. Produk yang terdiri atas 10 karton itu akan dikembalikan ke negara asal atau dimusnahkan sesuai prosedur yang berlaku.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI merespons temuan tersebut melalui penjelasan publik pada 20 November 2026. BPOM menyatakan bahwa produk Ladaku Merica Bubuk telah terdaftar di Indonesia setelah melalui penilaian terhadap aspek keamanan, mutu, dan label.

Meski telah terdaftar di dalam negeri, produk tersebut tetap harus memenuhi persyaratan keamanan pangan negara tujuan ekspor. BPOM menjelaskan bahwa setiap negara dapat memiliki ketentuan batas maksimum residu pestisida yang berbeda.

BPOM juga telah meminta klarifikasi kepada pelaku usaha dan menginstruksikan pengujian produk, termasuk terhadap batch yang sama dengan produk yang diberitahukan oleh Taiwan FDA, di laboratorium terakreditasi.

Tiametoksam dan fipronil merupakan bahan aktif pestisida yang digunakan untuk mengendalikan hama. Tiametoksam termasuk kelompok insektisida neonicotinoid, sedangkan fipronil termasuk kelompok insektisida phenylpyrazole.

Residu pestisida dapat tertinggal pada bahan pangan apabila penggunaannya tidak sesuai ketentuan atau proses pengendalian residunya tidak memenuhi persyaratan. Karena itu, pengawasan terhadap bahan baku dan produk akhir menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan pangan.

Batas maksimum residu atau Maximum Residue Limit (MRL) merupakan kadar residu pestisida yang diperbolehkan pada komoditas pangan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Nilai batas tersebut dapat berbeda antarnegara dan bergantung pada jenis bahan aktif serta komoditas yang diperiksa.

Temuan pada produk Ladaku menjadi pengingat bagi pelaku usaha pangan yang ingin memasuki pasar internasional.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

OTOMOTIF

Rp13 Triliun Transaksi Mobil Mewah Diduga Tak Dilaporkan, Ini Temuan PPATK

Oleh Van · 21 Nov, 16.31 WIB

JAKARTA — Dugaan penghindaran pajak dalam bisnis mobil mewah di Indonesia menjadi perhatian setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan indikasi transaksi penjualan senilai Rp13,08 triliun yang diduga tidak dilaporkan secara semestinya.

Temuan tersebut berkaitan dengan tiga grup perusahaan yang bergerak di bidang impor dan penjualan mobil mewah. PPATK mengidentifikasi sejumlah pola transaksi yang diduga digunakan untuk menyamarkan aliran dana dan aktivitas bisnis.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan, salah satu pola yang ditemukan adalah penggunaan rekening nominee serta pembentukan sejumlah perusahaan terafiliasi.

"Pola transaksi yang teridentifikasi adalah dengan menggunakan rekening nominee serta mendirikan sejumlah perusahaan terafiliasi …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ANEKA BERITA

10 BERITA

ASIA

Pakai Fasilitas Militer, 7 Perwira AU Malaysia Ditangkap Selundupkan Narkoba ke RI

Oleh Redaksi · 22 Nov, 21.37 WIB



BANDA ACEH - Kepolisian dan militer Malaysia membongkar jaringan penyelundupan narkoba lintas negara yang melibatkan aparat aktif. Sebanyak tujuh perwira Angkatan Udara Kerajaan Malaysia (RMAF) resmi ditangkap usai kedapatan memanfaatkan fasilitas penerbangan militer untuk menyelundupkan barang haram ke luar negeri, dengan tujuan utama Indonesia dan Filipina.Kasus memalukan ini bermula dari penggagalan pengiriman bagasi mencurigakan di Pangkalan Udara Subang pada pekan ini. Menurut Panglima RMAF Jenderal Tan Sri Muhamad Norazlan Aris, para pelaku berupaya mengelabui petugas dengan menyelipkan koper berisi narkotika di antara tumpukan bagasi lain yang telah lolos pemeriksaan mesin pemindai (X-ray).

Kecurigaan muncul ketika seorang petugas bagian pergerakan udara melihat lima tas berbalut plastik dan sebuah kotak tanpa stiker lulus uji keamanan tergeletak di lobi kedatangan dan pengambilan bagasi.

Saat petugas mengecek bagian kotak yang sedikit terbuka, terlihat beberapa botol berlabel pupuk kimia --benda berbahaya yang terlarang masuk ke dalam pesawat.

"Petugas yang berjaga langsung membawa bagasi tersebut ke mesin pemindai untuk diperiksa dan menemukan sejumlah paket tersusun rapi yang tampak mencurigakan. Petugas kemudian meminta personel lain mencari pemilik bagasi guna pemeriksaan lebih lanjut," ujar Norazlan kepada kantor berita Bernama, dikutip Minggu (22/11/2026).

Sempat Berusaha Kabur dan Merobek Tas

Dilansir Free Malaysia Today, penelusuran petugas mengarah kepada seorang perwira aktif yang bertugas dalam jadwal penerbangan RMAF tersebut. Saat dipanggil ke lokasi untuk pemeriksaan fisik, sang perwira sempat panik dan berusaha mengangkut kembali kelima tas itu ke dalam mobilnya, tetapi sigap dicegah petugas jaga.

Terpojok, tersangka kemudian merobek tas-tas tersebut menggunakan pisau dengan dalih tidak membawa kunci. Dari dalam tas, petugas mendapati bungkusan-bungkusan berwarna merah berisi kristal putih yang diduga kuat narkotika.

Temuan itu segera dilaporkan kepada komandan penjagaan dan Kepala Skuadron 211 pasukan pertahanan darat RMAF, sebelum diteruskan ke tim investigasi kriminal militer dan Departemen Investigasi Kejahatan Narkotika (JSJN) Bukit Aman, Kepolisian Diraja Malaysia.

Hasil uji laboratorium memastikan kristal tersebut merupakan metamfetamina, amfetamina, serta ekstasi (MDMA) dengan bobot total mencapai 96,64 kilogram senilai RM4,83 juta (sekitar Rp17,3 miliar), ditambah 6,98 kilogram cairan kimia prekursor.

Beroperasi Sejak Juli Lewat Jalur Sabah

Pengembangan kasus di Pangkalan Udara Subang memicu penangkapan berantai.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

INTERNASIONAL

Niatnya jadi Supir Taksi di Arab, Pemuda Cimahi Malah Berakhir di Medan Perang Ukraina

Oleh Redaksi · 22 Nov, 12.26 WIB



BANDA ACEH - Niat mencari penghasilan di luar negeri justru membawa seorang pemuda asal Cimahi, Jawa Barat, ke situasi yang jauh dari rencana awal. FS (29) yang semula ingin bekerja sebagai sopir taksi di Arab Saudi kini dikabarkan berada di Rusia dan diduga menjadi tentara yang terlibat dalam perang melawan Ukraina.Kisah ini mencuat setelah keluarga FS meminta bantuan pemerintah untuk memulangkannya ke Indonesia. Mereka mengaku kehilangan kontak dengan pria tersebut sejak 29 Oktober 2026.

Berdasarkan penuturan kakak kandung FS, Agris Yuni, adiknya awalnya memang berniat mengadu nasib ke Arab Saudi. Ia bahkan sudah mengikuti serangkaian tes untuk menjadi pengemudi taksi dan dinyatakan lolos.

Namun, rencana tersebut sempat batal karena FS merasa tidak sanggup membayar biaya administrasi yang harus dilunasi calon pekerja.

Situasi kemudian berubah setelah seseorang menawarkan kembali pekerjaan serupa dengan skema biaya keberangkatan yang ditanggung terlebih dahulu. Nantinya, biaya tersebut akan dipotong dari gaji setelah FS mulai bekerja.

Setelah mengurus paspor dan sejumlah dokumen, FS akhirnya berangkat ke Arab Saudi pada 3 Oktober 2026.

Sempat bekerja sebagai sopir di Arab Saudi sebelum dibawa ke Rusia

Menurut keterangan keluarga, FS sempat benar-benar bekerja sebagai pengemudi di Arab Saudi selama sekitar satu hingga dua minggu.

Pada periode tersebut, komunikasi dengan istri dan keluarganya masih berjalan normal melalui telepon maupun panggilan video.

Namun, memasuki pertengahan Oktober, FS mulai sulit dihubungi. Ketika akhirnya berhasil berkomunikasi kembali, ia mengaku sedang dibawa ke suatu tempat untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan mengurus dokumen pekerjaan.

Keluarga kemudian mendapat kabar mengejutkan bahwa FS ternyata sudah berada di Rusia.

Dalam sebuah panggilan video, ia terlihat mengenakan pakaian tentara. Kepada keluarga, FS juga mengaku mengalami perlakuan kasar selama berada di sana.

Agris menyebut adiknya bercerita pernah dipukuli, ditarik-tarik ketika sedang salat, dipaksa melakukan sesuatu, hingga mengalami kelaparan dan kedinginan.

Perjalanan yang harus ditempuh FS juga disebut sangat jauh sebelum akhirnya berada di lingkungan militer Rusia.

Keluarga pun semakin khawatir karena FS tidak leluasa menjelaskan siapa pihak yang bertanggung jawab atas perpindahannya dari Arab Saudi ke Rusia.

Bahkan, menurut Agris, ada WNI lain yang berada di Rusia dan memperingatkan agar keluarga tidak menyebarkan foto maupun kabar mengenai FS jika ingin yang …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

LINGKUNGAN

Kebakaran Bangunan Bersejarah Tugu Kunstkring Paleis, Pramono: Hampir Seluruh Ruangan Terbakar

Oleh Van · 21 Nov, 15.26 WIB

JAKARTA — Insiden kebakaran terjadi di bangunan bersejarah Tugu Kunstkring Paleis, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu, 21 November 2026 dini hari.

Api melalap hampir seluruh ruangan yang ada di bangunan tersebut dan beruntung tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

“Saya dari semalem sudah mendapatkan laporan (kebakaran) yang pertama dari Pak Wali, kemudian dari Kepala Dinas Kebudayaan,” ujar Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung kepada awak media saat mengunjungi lokasi pada Sabtu, 21 November 2026.

“Gedung yang dibangun 1913 ini apa ya, hampir seluruh ruangan kebakar dan alhamdulillah tidak ada korban,” imbuhnya.

Menurut keterangan yang dibagikan, Pramono mengungkapkan bahwa ada sekitar 21 unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan.

Setelah proses pendinginan, garis polisi juga terpasang di sekitar gedung untuk selanjutnya dilakukan penyebab kebakaran.

Soroti APAR yang Dimiliki Pihak Gedung

Lebih lanjut, Pramono menyoroti tentang penanganan kebakaran dan tata kelola gedung yang kini difungsikan sebagai restoran.

Ia mengimbau agar restoran besar harus memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang memadai untuk penanganan awal insiden kebakaran.

“Kalau melihat kejadian, kemudian di awal dicoba dipadamkan dengan APAR yang dimiliki, kemudian tidak bisa dan akhirnya mendatangkan Dinas Pemadam Kebakaran, menurut saya ini menjadi pengalaman yang sangat baik untuk penanganan kebakaran di Jakarta,” terang Pramono.

“Saya meminta untuk alat, kalau restoran yang seperti ini yang besar, gedungnya juga besar, tentunya harus punya perlengkapan yang lebih memadai,” sambungnya.

Bakal Evaluasi Kerja Sama dengan Pengelola

Di sisi lain, Pramono juga menegaskan bahwa nantinya akan ada evaluasi dengan pengelola gedung terkait kerja …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

LINGKUNGAN

Satgas PKH Temukan Pabrik Sawit di Riau Diduga Tampung Hasil Kebun Ilegal

Oleh Van · 21 Nov, 15.41 WIB

RIAU – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menemukan indikasi pabrik kelapa sawit (PKS) nonkebun milik PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, menampung hasil perkebunan yang diduga berasal dari kawasan hutan tanpa izin.

Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak dalam keterangan resminya Sabtu (21/11/2026) mengatakan, pabrik tersebut diduga melakukan pembelian sekaligus pengolahan tandan buah segar (TBS) dari aktivitas perkebunan ilegal di dalam kawasan hutan.

“Satgas PKH menemukan indikasi bahwa PKS nonkebun milik perusahaan tersebut di Kabupaten Kuantan Singingi melakukan pembelian dan pengolahan hasil perkebunan sawit yang berasal dari aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin,” kata Barita.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

LINGKUNGAN

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Sukanto Tanoto Dicabut, Pemerintah Didesak Hitung Kerugian Negara

Oleh Redaksi · 22 Nov, 20.35 WIB



BANDA ACEH - Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Gerindra sekaligus Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA), Kamrussamad mendesak agar pemerintah segera menghitung kerugian negara pasca disitanya lahan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) milik taipan Sukanto Tanoto yang berlokasi di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau."(Kami) mendesak pemerintah segera menghitung kerugian negara dari praktik under invoicing, penggelapan pajak, transfer pricing, kerusakan ekosistem lingkungan, kerusakan tatanan sosial dan budaya masyarakat adat," kata Kamrussamad dalam keterangan yang diterima Inilah.com di Jakarta, Minggu (22/11/2026).

Diketahui, lahan konsesi PT RAPP seluas sekitar 338.536 hektare di Riau telah diambil alih kembali oleh negara. Langkah penindakan ini diumumkan oleh Satgas PKH pada 20 November 2026 menyusul pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT RAPP melalui SK Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026.

Kamrussamad lalu membeberkan bahwa kekayaan sumber daya alam Indonesia dikendalikan Sukanto Tanoto dari kantor pusat di Singapura.

"Meskipun pabrik, lahan, dan operasional lapangan PT RAPP sepenuhnya beroperasi di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Indonesia dan berbadan hukum Indonesia (PT), namun pusat kendali korporasi dan strategi globalnya berada di Singapura. Hal ini menunjukkan komitmen untuk memajukan NKRI jauh dari semangat pendiri bangsa," ungkapnya.

Di samping itu, dia mengingatkan agar pemerintah dapat memitigasi risiko nasib para pekerja yang terlibat dalam bisnis PT RAPP tersebut.

"Kami mengingatkan agar pemerintah memitigasi risiko nasib karyawan, pekerja, supplier, mitra bisnis RAPP agar memastikan keberlangsungan bisnis tersebut dalam kendali negara tetap stabil," jelasnya.

Sebelumnya, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) kembali menertibkan sejumlah perusahaan yang diduga melanggar pemanfaatan kawasan hutan di Provinsi Riau.

Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak menyebut dua perusahaan yakni PT Gemilang Sawit Lestari (GSL), pabrik kelapa sawit (PKS) yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing).

Satunya lagi, PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) berlokasi di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau. "Langkah penertiban merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi kawasan hutan sekaligus memperbaiki tata kelola hutan agar kembali sesuai dengan fungsi dan peruntukannya," kata Barita, dikutip Jumat (20/11/2026).

Dalam penanganan PT GSL, kata dia, Satgas PKH menemukan indikasi bahwa PKS non-kebun itu, membeli dan mengolah sawit yang berasal dari aktivitas perkebunan di dalam …

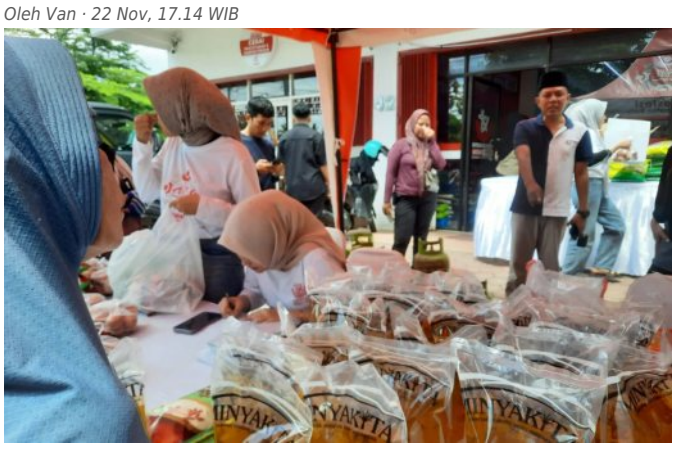
» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

EKONOMI

Lebih Murah dari Toko Modern, KDMP Tukangkayu Jual Sembako dan LPG Bersubsidi Tiap Minggu

Oleh Van · 22 Nov, 17.14 WIB



Antusiasme warga saat membeli minyak goreng subsidi di pasar murah.

BANYUWANGI — Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Tukangkayu, Kecamatan/Kabupaten Banyuwangi, menggelar kegiatan pasar murah bertajuk Belonjo Murah pada Minggu 22 November 2026.

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09:00 hingga 11:00 WIB di depan gerai koperasi ini melibatkan seluruh anggota koperasi serta warga sekitar.

Dalam kegiatan tersebut, KDMP Tukangkayu menyediakan berbagai kebutuhan pokok dari produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah disubsidi.

Seluruh komoditas dijual dengan harga yang diklaim jauh lebih murah dibandingkan harga di toko modern maupun toko kelontong.

Adapun daftar harga bahan pokok yang ditawarkan dalam program Belonjo Murah ini meliputi Beras SPHP Rp 55.000, Tabung Gas LPG 3 Kilogram (Kg) Rp 15.000, Gula pasir Rp 15.000, dan MinyaKita 1 liter Rp 15.000.

Ketua KDMP Tukangkayu, Imam Maskun, menjelaskan bahwa program ini merupakan agenda rutin yang diselenggarakan setiap hari Minggu sebagai bentuk pelayanan nyata koperasi kepada warga.

"Karena kegiatan Belonjo Murah ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat," jelas Imam Maskun saat ditemui di lokasi kegiatan.

Lebih lanjut, Imam menambahkan bahwa selain membantu meringankan beban ekonomi warga dalam memenuhi kebutuhan pokok bagi masyarakat.

"Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan perkembangan koperasi sekaligus membangun kepercayaan publik (public trust) masyarakat terhadap eksistensi KDMP Tukangkayu," katanya.

Dengan harga di bawah pasar, diharapkan seluruh barang yang disediakan di KDKMP dapat terdistribusikan dan tepat sasaran.

"Kami ingin menumbuhkan public trust dengan digelarnya kegitan Belonjo Murah ini setiap pekannya," jelas pria yang juga Ketua Asosiasi KDMP Kabupaten Banyuwangi ini.

Ia pun beeharap masyarakat dapat berbelanja dengan nyaman dan mendapatkan produk dengan kualitas baik serta harga terjangkau.(*)

EKONOMI

Baru Telat Bayar 5 Jam, Pengguna Threads Sebut Ibunya Diteror DC Pinjol hingga Meninggal

Oleh Van · 21 Nov, 15.16 WIB

JAKARTA — Sebuah unggahan pengguna Threads menyita perhatian setelah menceritakan dugaan teror debt collector (DC) pinjaman online yang disebut dialami keluarganya.

Dalam unggahan tersebut, pemilik akun mengaku sang ibu meninggal dunia setelah diduga mengalami tekanan akibat pesan ancaman dan telepon dari pihak penagih pinjaman.

Cerita itu dibagikan akun Threads @mohbilaakhansa pada Jumat (20/11/2026). Ia mengaitkan dugaan teror tersebut dengan aplikasi Pinjaman Go setelah dirinya terlambat membayar tagihan sekitar lima jam pada hari jatuh tempo.

"Ibu saya baru meninggal malam ini, dan kalian tau karna apa? Karna kelakuan salah satu oknum dc pinjaman online (PINJAMAN GO)," tulisnya mengawali unggahan.

Ia menjelaskan, keterlambatan pembayaran terjadi karena masih kekurangan sedikit dana.

Padahal, menurut pengakuannya, seluruh pinjaman yang dimiliki berencana dilunasi pada hari tersebut.

Namun, ia mengaku keluarganya justru menerima pesan bernada ancaman. Bahkan, ancaman tersebut disebut menyasar anggota keluarganya.

"Tiba tiba Ibu saya dapat chat ancaman kalo keluarga atas nama saya akan di bunuh dan di teror seumur hidup," lanjutnya.

Tak hanya melalui pesan, pengunggah menyebut ibunya juga menerima panggilan telepon dari nomor tidak dikenal. Dalam panggilan tersebut, sang ibu diklaim mendapat makian hingga menangis sepanjang hari.

"Dan berapa jam kemudian Ibu saya dapat telpon dari orang ga di kenal dan dia memaki maki Ibu saya sampai Ibu saya nangis seharian …" tulisnya.

Sempat Sesak Napas Sebelum Meninggal

Menurut pengunggah, adiknya kemudian mengabarkan bahwa sang ibu kembali menerima pesan ancaman berkali-kali.

Kondisi tersebut disebut membuat almarhumah terus menangis hingga mengalami sesak napas.

"Sampe akhirnya nafas ibu saya sesak di saat itu saya langsung pulang kerumah tapi pada perjalanan pulang kerumah saya dapet kabar kalo Ibu saya sudah tidak ada….." ungkapnya.

Setelah menerima kabar tersebut, pemilik akun mengaku langsung melunasi seluruh pinjaman dan menutup …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

SPORT

Awali Putaran Kedua, Persiraja Bertekad Balas Kekalahan dari PSPS

Oleh Redaksi · 21 Nov, 14.31 WIB

BANDA ACEH, BANDA ACEH – Persiraja Banda Aceh berambisi membuka putaran kedua Championship 2026/2027 dengan kemenangan. Laskar Rencong bertekad memaksimalkan keuntungan bermain di kandang saat menjamu PSPS Pekanbaru di Stadion H. Dimurthala, Banda Aceh, Sabtu (21/11) malam nanti.

Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 20.30 WIB tersebut menjadi momentum bagi Persiraja untuk bangkit setelah belum memperoleh hasil memuaskan pada laga terakhir melawan PSMS Medan.

Pelatih Persiraja, M. Ridwan, menyebut timnya telah melakukan persiapan dengan baik. Ia berharap evaluasi dari pertandingan sebelumnya dapat menjadi modal penting untuk menghadapi PSPS.

“Ini pertandingan pertama di putaran kedua. Pada pertandingan terakhir melawan PSMS, kami belum mendapatkan hasil yang bagus. Namun, kami banyak belajar dari pertandingan tersebut,” ujar Ridwan.

Ridwan mengakui kemenangan menjadi target utama timnya. Ia berharap persiapan yang telah dijalani dapat diterjemahkan para pemain menjadi penampilan maksimal di lapangan.

“Kami berusaha mendapatkan obat dengan meraih kemenangan. Persiapan yang sudah kami lakukan sangat baik. Mudah-mudahan kami bisa mewujudkan tiga poin di kandang,” katanya.

Meski tampil di hadapan pendukung sendiri, Persiraja tidak ingin meremehkan kekuatan PSPS. Ridwan menilai tim asal Pekanbaru tersebut memiliki kualitas dan kemampuan untuk mencuri poin, termasuk ketika bermain di kandang lawan.

Kewaspadaan itu juga didasari hasil pertemuan kedua tim pada putaran pertama. Saat bertandang ke markas PSPS, Persiraja harus pulang dengan kekalahan 1-2.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

HIBURAN

Isu Ahmad Dhani Menikah Lagi, Pernyataan Soal Mulan Jameela Viral

Oleh Redaksi · 22 Nov, 21.42 WIB



BANDA ACEH - Musisi Ahmad Dhani menjadi perbincangan pada media sosial setelah muncul isu dirinya telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang disebut-sebut berusia sebaya dengan putra sulungnya, Al Ghazali. Di tengah rumor yang belum terkonfirmasi tersebut, video lama Dhani yang membahas rumah tangganya bersama Mulan Jameela kembali viral.Video tersebut memperlihatkan Ahmad Dhani berbincang dengan Gading Marten, Andre Taulany, dan Desta dalam siniar Taulany TV. Dalam percakapan itu, Dhani mengungkapkan, dia pernah berencana bercerai dari Mulan Jameela.

"Jadi setahun yang lalu gue memutuskan mau cerai sama Mulan. Kalau kenapanya tidak usah diceritain," ujar Dhani dalam video tersebut.

Dhani mengaku sempat mengumpulkan ketiga putranya dari pernikahan terdahulu, yakni Al Ghazali, El Rumi, dan Dul Jaelani, untuk membicarakan rencana perceraian tersebut.

Menurut Dhani, Al dan Dul menangis ketika mendengar rencana itu. Namun, ia menilai tangisan keduanya bukan semata karena kemungkinan dirinya berpisah dari Mulan.

Dhani menyebut kedua putranya mengkhawatirkan nasib Safeea dan Ali, anak-anak dari pernikahannya dengan Mulan, yang berpotensi mengalami pengalaman serupa ketika orang tua mereka berpisah.

Dalam perbincangan tersebut, Dhani juga menjelaskan alasan rencana perceraiannya dengan Mulan akhirnya tidak terlaksana.

Menurut pengakuannya, hubungan rumah tangga mereka membaik setelah terjadi perubahan dalam dinamika hubungan suami istri.

Dhani bahkan menyebut dirinya pernah mempersilakan Mulan mengajukan gugatan cerai apabila ingin mengakhiri pernikahan.

"Saya sudah mempersilakan dia kalau memang mau gugat cerai dan ingin mengakhiri pernikahan ini," ungkapnya.

Ia juga menyampaikan pandangan pribadinya mengenai hubungan laki-laki dan perempuan. "Pokoknya jangan memaksa laki-laki untuk tidak menyukai perempuan lain. Dan kalau gue menikah lagi setelah gue bercerai, itu takdir," kata Dhani.

Dalam kesempatan yang sama, Dhani sempat melontarkan pernyataan bahwa dirinya merupakan seorang playboy dan menyebut dirinya sebagai buaya darat, laut, hingga udara.

Kemunculan kembali video tersebut bertepatan dengan ramainya spekulasi mengenai kehidupan pribadi Ahmad Dhani di media sosial.

Sejumlah warganet mengaitkan pernyataan lama Dhani dengan rumor bahwa dirinya telah menikah lagi.

Namun, hingga berita ini disusun, belum ada pernyataan resmi dari Ahmad Dhani maupun Mulan Jameela yang mengonfirmasi kabar tersebut. Identitas perempuan yang disebut-sebut sebagai istri baru Dhani juga belum dapat dipastikan.

LINGKUNGAN

Basarnas Sisir Pabrik Terbakar di Cikande, 36 Karyawan Masih Dicari

Oleh Van · 22 Nov, 13.56 WIB



Tim BASARNAS bergerak cepat melakukan pencarian dan penyelamatan di lokasi yang terdampak bencana.

BANTEN — Basarnas terus melakukan penyisiran di area pabrik permen PT Fonusa Agung Mulia yang terbakar di Kawasan Industri Pancatama, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten.

Kebakaran terjadi pada Sabtu, 21 November 2026 sekitar pukul 17.00 WIB dengan api membakar bangunan pabrik dan disertai kepulan asap hitam tebal.

Tim Basarnas Banten dikerahkan untuk membantu proses evakuasi serta pencarian karyawan yang belum diketahui keberadaannya.

36 Karyawan Masih dalam Pencarian

Pembaruan data terbaru Basarnas Banten, disebutkan bahwa ada 15 orang selamat dan 4 orang terluka yang dibawa ke RS Hermina Ciruas dan Klinik Modern.

Kemudian 3 mayat ditemukan oleh petugas, sehingga masih dilakukan 36 orang lainnya, di mana sebelumnya dilaporkan 39 orang dalam pencarian.

“Tiga orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia,” ujar Kasubsie Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Banten, Rizky Dwianto kepada awak media pada Minggu, 22 November 2026.

Di lokasi kebakaran, terlihat ambulans dan kantong jenazah sudah disiapkan, sehingga jenazah langsung dibawa rumah sakit untuk proses identifikasi.

Diketahui bahwa petugas masih terus melakukan pencarian dengan masuk ke area bangunan yang terbakar.

“Personel Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten melaksanakan penyisiran pada sejumlah bagian bangunan berdasarkan area atau site yang dicurigai terdapat korban,” jelasnya.

Dalam operasi tersebut, Basarnas berkoordinasi dengan petugas pemadam kebakaran Provinsi Banten, Kabupaten Serang, Kota Serang, BPBD Kabupaten Serang, serta PMI Kabupaten Serang.

Kondisi Bangunan Jadi Tantangan Pencarian

Penyisiran dilakukan dengan mengutamakan keselamatan personel mengingat kondisi bangunan pascakebakaran dan masih adanya titik yang perlu penanganan.

Rizky mengatakan seluruh unsur SAR gabungan berupaya maksimal untuk menemukan para karyawan yang belum diketahui keberadaannya.

“Seluruh unsur SAR gabungan berupaya maksimal untuk menemukan para korban dengan tetap mengutamakan keselamatan personel di lapangan,” lanjutnya.

Data korban terus diperbarui seiring berlangsungnya proses pencarian dan identifikasi.(*)

KOMUNITAS

Teuku Kamaruzzaman Pimpin IKAKUM USK, Alumni Ditarget Berperan dalam Kebijakan Publik

Oleh Van · 22 Nov, 16.21 WIB



Keindahan arsitektur bergaya klasik pada salah satu gedung fakultas di universitas.

BANDA ACEH – Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (IKAKUM USK) memasuki babak baru kepengurusan periode 2026–2031. Namun, pelantikan yang berlangsung Sabtu, 21 November 2026, bukan sekadar pergantian pengurus, melainkan membawa tuntutan agar alumni mampu mengambil peran nyata dalam pembentukan kebijakan publik, penguatan penegakan hukum, dan pembangunan solidaritas lintas profesi.

Teuku Kamaruzzaman, S.H., yang dikenal dengan sapaan Ampon Man, resmi dilantik sebagai Ketua IKAKUM USK untuk lima tahun ke depan. Pelantikan berlangsung di Pascasarjana Fakultas Hukum USK, Darussalam, Banda Aceh, bersamaan dengan Kenduri Maulid Nabi Muhammad SAW.

Kegiatan tersebut dihadiri alumni Fakultas Hukum USK dari beragam bidang profesi. Mereka berasal dari lingkungan peradilan, kejaksaan, birokrasi, advokat, notaris, TNI, Polri, akademisi, politik, parlemen, dunia usaha, pendidikan, BUMN, perbankan, hingga kalangan tokoh masyarakat dan adat.

Dekan Fakultas Hukum USK, Prof. Dr. Zahratul Idami, S.H., M.Hum., memimpin pelantikan pengurus. Selain Teuku Kamaruzzaman sebagai ketua, kepengurusan inti diisi Khairani Arifin, S.H., M.H. sebagai Ketua Harian, Amrina Habibi, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Umum, serta Alfaraby, S.H. sebagai Bendahara Umum.

Alumni diharapkan menjadi jembatan kampus dan dunia kerja

Wakil Rektor III USK, Dr. Rina Suryani Oktari, S.Kep., M.Si., FRSPH, dalam sambutannya menyampaikan harapan agar kepengurusan IKAKUM USK periode 2026–2031 dapat memperkuat kontribusi terhadap visi universitas. Sinergi alumni dinilai penting untuk mendukung USK menjadi universitas sosio-teknopreneur yang inovatif, mandiri, serta memiliki reputasi di tingkat global.

Rina juga mengharapkan organisasi alumni dapat membuka hubungan yang lebih erat antara mahasiswa dengan dunia profesional dan kehidupan sosial, sehingga manfaatnya tidak berhenti di lingkungan kampus, tetapi menjangkau tingkat lokal, regional, nasional hingga internasional.

"Keberadaan IKAKUM USK diharapkan dapat menjadi penghubung mahasiswa USK dengan dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat, serta memberi manfaat dalam lingkup lokal, regional, nasional hingga internasional," demikian pesan yang disampaikan dalam sambutannya pada 21 November 2026.

Dekan: Alumni bukan sekadar perkumpulan nostalgia

Dekan FH USK, Zahratul Idami, menegaskan bahwa keberadaan alumni merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan kemajuan perguruan tinggi. Hubungan antara almamater dan alumni, menurutnya, harus terus dipelihara melalui kontribusi, kolaborasi, serta penguatan silaturahmi lintas generasi.

Ia mengajak seluruh keluarga besar Fakultas Hukum USK untuk bersama-sama membangun fakultas yang unggul dengan dukungan alumni yang memiliki …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

EKONOMI

BSU 2026 Rp900 Ribu: Tak Perlu Daftar, Ini Syaratnya

Oleh Van · 22 Nov, 15.28 WIB



Kabar baik bagi para pekerja! Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900 ribu siap mendukung kesejahteraan Anda.

JAKARTA – Pekerja yang berharap mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 tidak perlu repot mencari formulir pendaftaran. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa bantuan tersebut tidak dibuka melalui pendaftaran mandiri, melainkan ditentukan berdasarkan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang kemudian diverifikasi sesuai ketentuan pemerintah.

Program BSU 2026 disiapkan untuk membantu menjaga daya beli pekerja dan buruh di tengah kebutuhan ekonomi. Bantuan ini diberikan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember 2026. Pembayaran dilakukan sekaligus sehingga penerima yang memenuhi kriteria berhak memperoleh total Rp900.000.

Penyaluran bantuan direncanakan berlangsung pada November hingga Desember 2026. Meski demikian, pekerja perlu memahami bahwa memenuhi persyaratan belum otomatis menjamin bantuan langsung masuk ke rekening. Penetapan penerima tetap melalui proses pemeriksaan dan validasi data oleh pemerintah.

Tidak Ada Pendaftaran Mandiri BSU 2026

Kemnaker menyatakan pekerja tidak perlu mendaftarkan diri secara langsung untuk memperoleh BSU. Data calon penerima berasal dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang selanjutnya diproses melalui verifikasi berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan.

Dalam keterangannya melalui akun Instagram resmi @kemnaker yang dikutip pada Sabtu, 21 November 2026, Kemnaker mengingatkan pekerja agar tidak sekadar berharap mendapatkan bantuan, tetapi terlebih dahulu memastikan telah memenuhi kriteria yang berlaku.

Dengan mekanisme tersebut, pekerja diminta memastikan status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, data identitas, serta informasi upah yang tercatat sesuai kondisi sebenarnya. Kesalahan atau ketidaksesuaian data berpotensi memengaruhi proses penetapan penerima.

Siapa yang Berhak Mendapat BSU 2026?

Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria bagi pekerja yang berpeluang menerima subsidi upah. Persyaratan tersebut meliputi:

- Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) hingga Agustus 2026.
- Memiliki gaji atau upah paling tinggi Rp3,5 juta per bulan, atau mengikuti ketentuan batas upah minimum wilayah sesuai regulasi.
- Diprioritaskan bagi pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU.
- Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, maupun anggota Polri.

Ketentuan batas upah tidak selalu sama di setiap daerah. Bagi pekerja yang berada di wilayah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih tinggi dari Rp3,5 juta, batas penghasilan penerima menyesuaikan UMK setempat sesuai ketentuan pembulatan dalam regulasi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

LIFESTYLE

Mengenal Suku Baduy, Masyarakat Adat yang Tetap Menjaga Tradisi Leluhur di Tengah Modernisasi

Oleh Van · 22 Nov, 13.14 WIB



Potret anak-anak suku Baduy yang hidup harmonis dan menyatu dengan alam.

BANTEN — Suku Baduy merupakan masyarakat adat yang tinggal di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten. Dikenal juga sebagai Urang Kanekes, masyarakat ini mempertahankan tradisi leluhur dan menjalankan kehidupan yang erat dengan alam.

Masyarakat Baduy merupakan bagian dari etnis Sunda dan menggunakan bahasa Sunda dialek Banten dalam kehidupan sehari-hari. Mereka dikenal memegang teguh pikukuh, yakni aturan adat yang menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan.

Wilayah tempat tinggal mereka berada di kawasan Pegunungan Kendeng. Lingkungan alam, hutan, dan ladang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat adat tersebut.

Perbedaan Baduy Dalam dan Baduy Luar

Secara umum, masyarakat Baduy dikenal terbagi menjadi Baduy Dalam dan Baduy Luar. Baduy Dalam dikenal sebagai kelompok yang menjalankan aturan adat lebih ketat, sedangkan Baduy Luar memiliki sejumlah kelonggaran dalam berinteraksi dengan kehidupan modern.

Baduy Dalam tinggal di tiga kampung utama, yakni Cibeo, Cikertawana, dan Cikeusik. Sementara itu, masyarakat Baduy Luar tinggal di kampung-kampung yang mengelilingi kawasan tersebut.

Perbedaan keduanya juga terlihat dari pakaian yang dikenakan. Masyarakat Baduy Dalam identik dengan pakaian dan ikat kepala berwarna putih, sedangkan Baduy Luar umumnya mengenakan pakaian serta ikat kepala berwarna hitam.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Baduy Dalam membatasi penggunaan teknologi modern, termasuk perangkat elektronik. Baduy Luar relatif lebih terbuka terhadap sejumlah pengaruh dari luar, meskipun tetap menjalankan aturan adat.

Pikukuh, Alam, dan Mata Pencaharian

Pikukuh menjadi pedoman penting yang mengatur hubungan masyarakat Baduy dengan sesama manusia, leluhur, dan lingkungan. Prinsip tersebut tercermin dalam cara mereka menjaga kawasan hutan dan menjalankan kehidupan sederhana.

Bercocok tanam menjadi salah satu mata pencaharian utama masyarakat Baduy, terutama melalui sistem pertanian padi huma atau ladang. Mereka juga membuat berbagai kerajinan, seperti kain tenun, tas koja, serta perlengkapan tradisional lainnya.

Kepercayaan Sunda Wiwitan menjadi bagian dari kehidupan spiritual masyarakat Baduy. Ajarannya berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur dan kepatuhan terhadap pikukuh yang diwariskan secara turun-temurun.

Salah satu tradisi yang dikenal luas adalah Seba Baduy. Dalam kegiatan tahunan tersebut, masyarakat Baduy berjalan kaki menuju pusat pemerintahan untuk bersilaturahmi sekaligus membawa hasil bumi sebagai bentuk penghormatan dan penyampaian pesan kepada pemerintah.

Sebelum Seba, terdapat rangkaian tradisi Kawalu yang berkaitan dengan ungkapan syukur setelah panen.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ISLAM

Kecanggihan Teknologi AI, Ibarat Pisau Bermata Dua

Oleh Yuli Emamarini · 22 Nov, 06.00 WIB



Kecerdasan buatan adalah teknologi kuat yang membutuhkan kendali etika dan spiritual agar bermanfaat bagi manusia.

ERKEMBANGAN teknologi Artificial Intelligence (AI) semakin meluas di berbagai sektor kehidupan. Salah satunya dalam sektor vital seperti kesehatan dan keuangan untuk penemuan obat dan analisis risiko.

Singapura dikabarkan berencana akan memanfaatkan robot humanoid untuk keamanan publik pada 2028 nanti.

Namun, muncul pula kekhawatiran serius disinformasi, deepfake, pelanggaran terhadap privasi, serta ancaman tidak terkendalinya kemampuan AI memperbaiki dirinya sendiri secara rekursif.

Sebelumnya Pelopor AI Dunia seperti Yoshua Bengio dan Geoffrey Hinton dalam riset di Jurnal Cambridge Programme on AI Science and Policy memperingatkan ancaman intelligence explosion akibat AI.

Kekuatan AI dikhawatirkan terus meningkat hingga tidak terkendali. Satu pengembang bahkan disetarakan dengan jutaan ahli, sehingga mereka mendesak agar dibuat regulasi ketat secepat mungkin.

Sementara itu warga AS melakukan demonstrasi di Chapel Hill, North Carolina pada 2 September 2026 lalu menolak pusat data AI karena menimbulkan aneka masalah termasuk air keruh dan kebisingan. Terjadi dilema antara infrastruktur pusat data AI terhadap lingkungan dan ekonomi.

Ibarat Pisau Bermata Dua

Perkembangan kecanggihan teknologi AI seperti pisau bermata dua. Di satu sisi ia memberikan kemudahan lewat otomatisasi, diagnosis medis, akses informasi yang instan, namun disisi lain menimbulkan ancaman bagi kehidupan manusia.

Tanpa adanya regulasi, etika, dan standar yang benar, kecanggihan AI bisa menimbulkan dampak buruk yang mengkhawatirkan.

Apalagi jika kecanggihan AI berada di tangan manusia yang tidak memiliki akidah yang benar, mengabaikan hukum syara', dan menjadikan materi sebagai tujuan, maka AI bisa sangat berbahaya.

Pandangan Islam Terkait AI

Dalam Islam AI adalah madaniyah atau produk dari sains dan teknologi, dia hanya alat dan hukum asalnya mubah atau boleh saja digunakan selama membawa kemaslahatan dan tidak mendatangkan kerusakan.

Hukum penggunaannya dikembalikan kepada tujuan dan dampak yang ditimbulkannya.

Kecanggihan teknologi AI tidak boleh menggantikan peran ulama sehingga tidak bisa dijadikan rujukan untuk menetapkan suatu hukum.

Karena AI, bekerja berdasarkan data dan algoritma, tidak memiliki kesadaran, nurani, pemahaman yang hakiki terhadap realitas spiritual, dan tidak dibebani tanggung jawab moral di hadapan Allah. Manusia lah yang harus bertanggung jawab atas keputusan yang dihasilkan dari penggunaan AI.

Kecerdasan buatan atau AI adalah fenomena kontemporer, sehingga tidak ada dalil Al-Qur'an maupun hadits yang menyebutkan secara jelas.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

REDAKSI

PENERBIT PT. Harian Aceh Indonesia
PEMIMPIN REDAKSI Muhammad Saman
REDAKTUR PELAKSANA Adam
REDAKTUR Hayat
SEKRETARIS REDAKSI Ola

Jurnalis
Banda Aceh:
1. IRWAN SAPUTRA - NOMOR 12334-PWI/WDa/DP/XII/2017/01/01/912.
2. Hamdani

Bireuen:
1. M. Ilham Sakubat

Lhokseumawe:
1. Yoppi

Aceh Barat:
1. Kurniawan

Jawa Timur:
1. Rut Sriwahyuni

Fotografer:
1. Mishabul Amin
2. Nazaruddin

Social Media Manager:
1. Syukur M. Amin